

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 19,21,22 Juni Dan 17 Juli 2017



TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juni 2016
Waktu : 12.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin Tanggal 19 Juni 2017, kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menjelaskan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 32 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 13.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sebelumnya akan kami sampaikan kronologi agenda pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Juni 2017 telah kami terima Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 045/1223/2017 Tanggal 8 Juni 2016 Perihal Pengiriman Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Pada tanggal 9 Juni 2017 oleh DPRD diagendakan Rapat Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang bersamaan dengan penjadwalan pembahasan LHP BPK RI, namun dalam

pelaksanaannya mengalami penundaan dikarenakan kuorum rapat tidak terpenuhi.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2017 dilaksanakan kembali Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang, yang hasilnya telah ditetapkan jadwal pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, di mana rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna pertama dari empat rapat paripurna yang diagendakan.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuk acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Kepada Saudara Bupati Rembang, dipersilahkan.

==== *PENJELASAN BUPATI* ====

- (*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir*)

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian telah kita dengar bersama penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 oleh Saudara Bupati Rembang, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi dengan pemandangan umumnya, yang mana penyusunannya akan dilaksanakan esok hari tanggal 20 Juni 2017, dan penyampaiannya dilaksanakan dalam rapat paripurna II pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 14.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahan saya di dalam memimpin rapat.

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016;

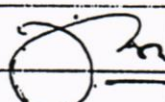

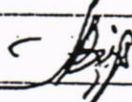
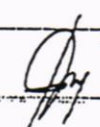
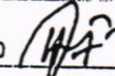
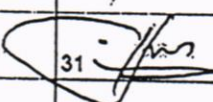
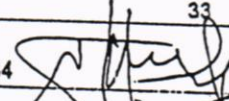

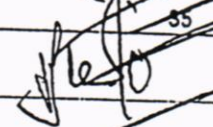
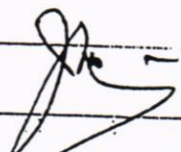
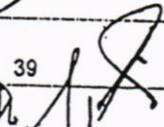
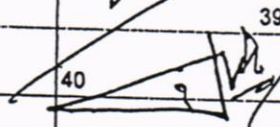
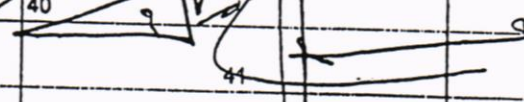
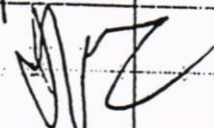



**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016**

HARI/TANGGAL : SENIN, 19 JUNI 2017

PUKUL : 12.00 WIB

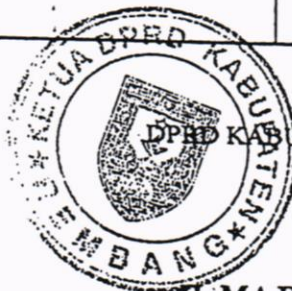
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR.HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	





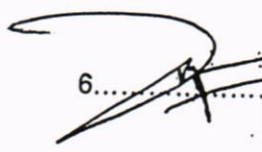

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

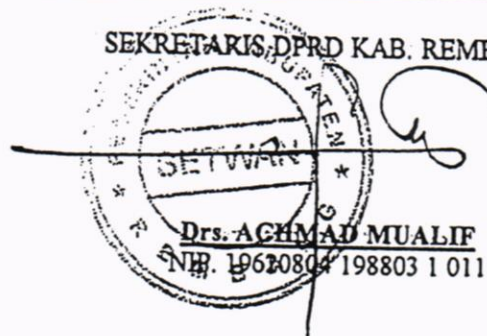


H. MAJID KAMIL.MZ

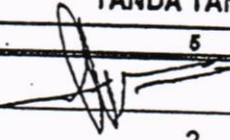
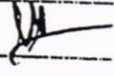




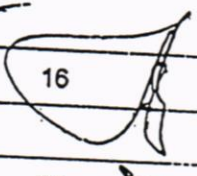
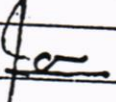



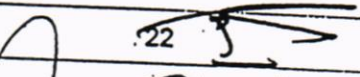


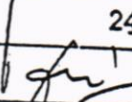
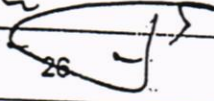
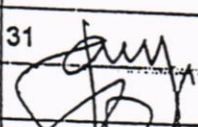
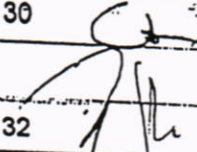
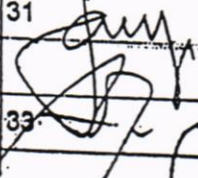
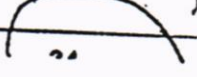
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 19 JUNI 2017
PUKUL : 12.00 WIB

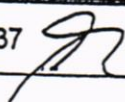
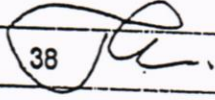
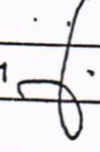

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	R. PRABOWO AJI SASMITO, S.S., M.H. BINTARNO, S.H.	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	RIWAYAT SOSIYANTO	WaKa. Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Drs. MAHZUMI, M.H	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

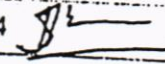

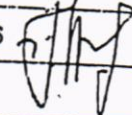
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



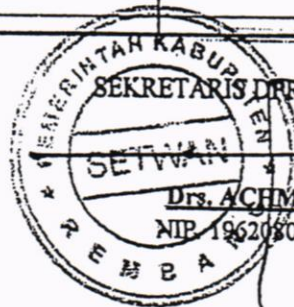
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 19 JUNI 2017
PUKUL : 12.00 WIB

No	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5	
	STAF AHLI BUPATI	Mun Effendi	SAB	1 
	STAF AHLI BUPATI	Narsono	- - -	2 
	STAF AHLI BUPATI			3
	STAF AHLI BUPATI			4
	ASISTEN I SEKDA			5
	ASISTEN II SEKDA			6
	ASISTEN III SEKDA			7
	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alhamsani	Keleng	8 
	BAG. HUKUM			9
	BAG. HUMAS	Kurniati	Bag. Humas	10 
	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latoef M. M	Bag. Kesejahteraan Rakyat	13 
	BAG. UMUM			14
	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Harjant	Bag. Org	15 
	BPPKAD	MUBIN	BPPKAD	16 
	INSPEKTORAT	FAMUDIN	INSPEKTOR	17 
	BAPPEDA	HARI S	Bappeda	18 
	DINPERMADES			19
	B-K D	Suparmi		20 
	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	Sri Sugiyati	PLT Kadm	21 
	B P B D	SUMARNO	Kabid	22 
	DPU TATA RUANG	Mulyono	Ket. Mus. -	23 
	DINPERKIM	Desha Nurani	Kabid.	24 
	DINAS KESEHATAN	Supriyati	Seleset	25 
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH-RAGA	Alhamsani	PLT	26 
	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
	DINTANPAN			28
	DINLUTKAN			29
	DISKOMINFO	Andi B		30
	DINAS PERHUBUNGAN	Suyono		31 
	DINAS DUKCAPIL	DJOJO P	Seleset	32 
	DINSOSIAL P2.KB.	Dr. Widyanti A.	ka.	33 
	DINRI IDPAR	34 

1. NAMA BAG/DINAS/KANTOR	2. NAMA	3. JABATAN	4. TANDA TANGAN
2	3	4	5
AS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Egi Winarto		37 
SUD dr. R. SUTRASNO	Sudrasno	Plt Ka Ta	38 
SATPOL PP			39
TIM PKK KAB. REMBANG			40
P D A M	M AFFAN	Dinkultr	41 
PERCETAKAN DAERAH			42
PD. BANK PASAR			43
BANK JATENG CAB. REMBANG			44
BRI CAB. REMBANG			45
PD BPR BKK LASEM			46
PT. R B S J			47
APOTIK DAERAH			48
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	ATHO' ILLAH.	Ka	49 
DIPENDA PROPINSI			50
BPS KAB. REMBANG			51
RUMAH TAHANAN			52
PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
KANTOR POS DAN GIRO			56
TELKOM REMBANG			57
PLN CAB. REMBANG			58
BAWASLU KAB. REMBANG			59
B P N KAB. REMBANG			60
KANTOR PAJAK			61
UP3AD (ASET DAERAH)			62
KANTOR PELABUHAN			63
KETUA KPU KAB. REMBANG			64
SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
BTPN KCP. REMBANG			67
PERUM PEGADAIAN			68
BSM.BANK DANAMON			69
DHARMA WANITA PERSATUAN			70
GERAKAN PRAMUKA			71
PMI CAB. REMBANG			72
STIE. YPPI REMBANG			73

	1	2	3	4	5
		AN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
					77
		DPC PARTAI HANURA			78
		DPC PKS.			79
0		DPC PARTAI NASDEM			80
1		DPC PARTAI GERINDRA			81
2		DPC PKB			82
3		DPC PDI PERJUANGAN			83
4		SUARA MERDEKA			84
5		CAKRA TV			85
6		RADIO CBFM			86
7		RADIO R2B			87
8		MAJALAH BANGKIT			88
9		PATI EKSPRESS			89
0		RADIO MATA AIR			90
		SIKIMBAR RAKYAT			91
2		CARAKA CANDI			92
3		KEDAULATAN RAKYAT			93
4		Hari Sumbawa	BPPKAD	Kahmad Akh	94 
5		Agus	Kodim		95 
6		Mira	Pemer.	Pulraj Anggela	96 
7					97
8					98
9					99
10					100
11					101
12					102
13					103
14					104
15					105
16					106
17					107
18					108
19					109
0					110
1					111
2					112
3					113
4					114
5					115

LOKASI/LOKASI/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
			119
			120
			121
			122
			123
			124



 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016

HARI/TANGGAL : SENIN, 19 JUNI 2017

PUKUL : 12.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	M. Rusyidi	1
2	CAMAT KALIORI	M. Rokhim	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Subant	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

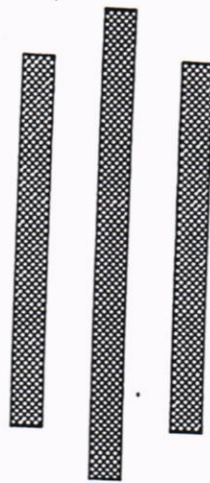
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. ACHMAD MUALIE
 NIP. 19620804 198803 1 011



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR
NOTA KEUANGAN

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN

2016



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.490.592.742.455,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.564.868.839.955,55 atau 104,98%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.874.875.616.260,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.734.304.081.928,58 atau 92,50% meliputi atas Belanja dan Transfer dengan rincian untuk Belanja dari yang direncanakan sebesar Rp.1.577.568.770.260,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.438.006.027.928,58 dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp.297.306.846.000,00 realisasinya adalah sebesar Rp.296.298.054.000,00.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.396.607.873.805,00 realisasinya sebesar Rp.396.607.873.805,61 atau 100,00% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.12.325.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.12.296.725.422,00 atau 99,77%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 :

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
PENDAPATAN - LRA	1.490.592.742.455,00	1.564.868.839.955,55	104,98	1.408.950.534.485,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	217.796.928.144,00	234.168.365.750,55	107,52	193.122.759.856,80
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	41.678.500.000,00	48.420.954.850,00	116,18	42.306.265.606,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	20.893.370.500,00	23.985.514.302,50	114,80	32.227.998.903,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.564.456.000,00	6.564.459.237,00	100,00	4.447.117.385,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	148.660.601.644,00	155.197.437.361,05	104,40	114.141.377.962,80
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.271.228.910.311,00	1.329.211.617.301,00	104,56	1.215.689.423.357,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	865.902.960.578,00	935.943.695.312,00	108,09	852.722.349.235,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	19.413.000.000,00	28.621.805.639,00	147,44	20.707.971.300,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	14.844.259.000,00	14.382.252.673,00	96,89	10.503.522.935,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	671.800.490.578,00	785.380.985.000,00	116,91	723.091.447.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	159.845.211.000,00	107.558.652.000,00	67,29	98.419.408.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	236.903.900.550,00	286.903.900.000,00	100,00	268.241.945.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	286.903.900.550,00	286.903.900.000,00	100,00	268.241.945.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	91.058.576.183,00	81.133.459.989,00	89,10	84.351.397.342,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	91.058.576.183,00	81.133.459.989,00	89,10	84.351.397.342,00
Bantuan Keuangan - LRA	27.363.473.000,00	25.230.562.000,00	92,21	10.373.731.780,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	27.363.473.000,00	25.230.562.000,00	92,21	10.373.731.780,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	1.566.904.000,00	1.488.856.904,00	95,02	138.351.272,00
Pendapatan Hibah - LRA	1.566.904.000,00	1.488.856.904,00	95,02	138.351.272,00
BELANJA	1.577.568.770.260,00	1.438.006.027.928,58	91,15	1.049.597.949.567,74
BELANJA OPERASI	1.149.064.464.307,00	1.092.443.576.627,58	95,07	997.617.222.548,74
Belanja Pegawai	859.941.041.586,00	839.766.248.587,00	97,65	775.602.699.734,00
Belanja Barang dan Jasa	251.438.817.221,00	217.960.717.279,58	86,69	195.418.791.027,74
Belanja Bunga	37.000.000,00	1.605.011,00	4,34	7.985.987,00
Belanja Hibah	29.947.605.500,00	27.269.005.350,00	91,06	23.873.745.800,00
Belanja Bantuan Sosial	7.700.000.000,00	7.446.000.000,00	96,70	2.714.000.000,00
BELANJA MODAL	427.734.930.953,00	345.545.721.301,00	80,79	51.980.727.019,00
Belanja Modal Tanah	6.000.000,00	5.947.000,00	99,12	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.543.047.540,00	53.241.245.023,00	74,42	28.577.303.484,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.780.150.611,00	120.903.440.128,00	81,26	6.570.364.200,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	190.655.068.502,00	164.787.530.250,00	86,43	15.593.995.535,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.750.664.300,00	6.607.558.900,00	39,45	1.239.063.800,00
BELANJA TAK TERDUGA	769.375.000,00	16.730.000,00	2,17	0,00
Belanja Tak Terduga	769.375.000,00	16.730.000,00	2,17	0,00
TRANSFER	297.306.846.000,00	296.298.054.000,00	99,66	161.659.950.800,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.455.961.000,00	6.455.961.000,00	100,00	6.157.224.400,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.735.350.000,00	3.735.350.000,00	100,00	3.620.300.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.720.611.000,00	2.720.611.000,00	100,00	2.536.924.400,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	290.850.885.000,00	289.842.093.000,00	99,65	155.502.726.400,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	289.759.929.000,00	288.868.332.000,00	99,69	154.816.933.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.956.000,00	973.761.000,00	89,26	685.793.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(384.282.873.805,00)	(169.435.241.973,03)	44,09	197.692.634.118,06
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	396.607.873.805,00	396.607.873.805,61	100,00	209.585.690.530,55
Penggunaan SILPA	396.607.873.805,00	396.607.873.805,61	100,00	209.585.690.530,55

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.325.000.000,00	12.296.725.422,00	99,77	10.670.450.843,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	100,00	10.617.000.000,00
	55.000.000,00	26.725.422,00	48,59	53.450.843,00
PEMBIAYAAN NETTO	384.282.873.805,00	384.311.148.383,61	100,01	198.915.239.687,55
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	214.875.905.410,58	0,00	396.607.873.805,61

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Juni 2017
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Kedua membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dengan agenda pokok penyampaian pemandangan umum fraksi – fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Keabsahan kuorum rapat paripurna ini adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna pertama pada tanggal 19 Juni 2017 dalam

membahas Raperda, yaitu dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang. Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna hari ini telah terpenuhi.

Dengan mengucap " *Bismillahirrohmaanirrohiim* " tepat pukul 12.55 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Agar di dalam penyampaiannya dapat berjalan tertib, kepada Saudara-saudara

yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Drs.H.Muh. Subawoto
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Frida Iriani
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. H. Yudianto, S.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, S.H.,M.Si.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Nur Jannah

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ==

- *(Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini. Untuk rapat paripurna ketiga dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, akan dilaksanakan besok pagi Kamis tanggal 22 Juni 2017.

Akhirnya dengan mengucap "*Alhamdulillah* *alamin*" tepat pukul 13.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2016.

**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : RABU, 21 JUNI 2017
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



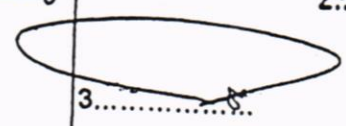






DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. GUNASIH, S.E

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : RABU, 21 JUNI 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAPIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	R. PRABOWO AJI SASMITO, S.S, M.H	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	RIWAYAT SOSIYANTO	Waka. Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Drs. MAHZUMI, M.H	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

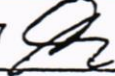


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Dr. AGHMAD MUALIE
 NIP. 19620804 198803 1 011

**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016**

HARI/TANGGAL : RABU, 21 JUNI 2017

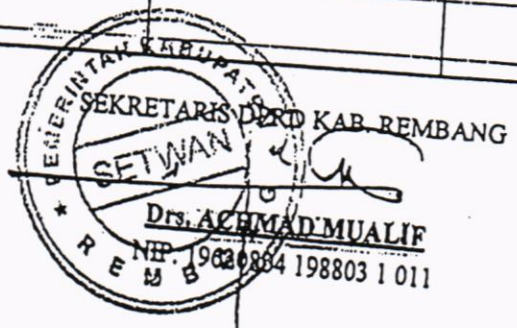
PUKUL : 11.00 WIB

BADAN/BAG/DINA/SIKANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
STAF AHLI BUPATI	Muz Effendi	STB	1
STAF AHLI BUPATI			2
STAF AHLI BUPATI			3
STAF AHLI BUPATI			4
ASISTEN I SEKDA			5
ASISTEN II SEKDA			6
ASISTEN III SEKDA			7
BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Hukum	9
BAG. HUMAS	Kerem P	Humas	10
BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Giantarto		11
BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sri Nujanti	Kasubag	12
BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Labiha Han	PSD	13
BAG. UMUM			14
BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
BPPKAD	MUBIN	Kabon	16
INSPEKTORAT	FAHAUDIN	INSPEKTUR	17
BAPPEDA	HARI S	BAPPEDA	18
DINPERMADES	ARIST BUNIS	Kabid. FKLP	19
B.K.D			20
DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	Sri Sugiyanti	Pdt Kadim	21
B P B D	ANJAN	Reli	22
DPU TATA RUANG	Triwoto Ing	Set	23
DINPERKIM	Suyoko	Plt Kadim	24
DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Setretaris	25
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
DINAS INDAGKOP & UMKM			27
DINTANPAN	SURAMIA	Kadim	28
DINLUTKAN	SIPARMAN	Kadim	29
DISKOMINFO			30
DINAS PERHUBUNGAN	Suyoko	Kadim	31
DINAS DUKCAPIL	P. Dhanu	Kadim	32
DINSOSIAL P2 KB	RIKATI HI	Kadim	33
DINBUDPAR	Triwoto Ing	Kadim	34

1. AN/BAG/DINAS/KANTOR	2. N-A-M-A	3. JABATAN	4. TANDA-TANGAN
2	3	4	5
S PERPUSTAKAAN & ARSIP	Egi Winarno	Ka Din Arpus	37 
SUD dr. R. SUTRASNO	Dr. Agus Setyoharjo	Dokter	38 
SATPOL PP			39
TIM PKK KAB. REMBANG			40
P D A M			41
PERCETAKAN DAERAH			42
PD. BANK PASAR			43
BANK JATENG CAB. REMBANG			44
BRI CAB. REMBANG			45
PD BPR BKK LASEM			46
PT. R B S J			47
APOTIK DAERAH			48
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. Dr. Anshary	Kemenag	49 
DIPENDA PROPINSI			50
BPS KAB. REMBANG			51
RUMAH TAHANAN			52
PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
KANTOR POS DAN GIRO			56
TELKOM REMBANG			57
PLN CAB. REMBANG			58
BAWASLU KAB. REMBANG			59
B P N KAB. REMBANG			60
KANTOR PAJAK			61
UP3AD (ASET DAERAH)			62
KANTOR PELABUHAN			63
KETUA KPU KAB. REMBANG			64
SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
BTPN KCP. REMBANG			67
PERUM PEGADAIAN			68
BSM. BANK DANAMON			69
DHARMA WANITA PERSATUAN			70
GERAKAN PRAMUKA			71
PMI CAB. REMBANG			72
STIE. YPPI REMBANG			73

1	2	3	4	5
	DAN/BAG/DINAS/KANTOR	N.A.M.A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PAN			77
2	DPC PARTAI HANURA			78
3	DPC-PKS			79
4	DPC PARTAI NASDEM			80
5	DPC PARTAI GERINDRA			81
6	DPC PKB			82
7	DPO PDI PERJUANGAN			83
8	SUARA MERDEKA			84
9	CAKRA TV			85
10	RADIO CBFM			86
11	RADIO R2B			87
12	MAJALAH BANGKIT			88
13	PATI EKSPRESS			89
14	RADIO MATA AIR			90
15	SIIMBAR RAKYAT			91
16	CARAKA CANDI			92
17	KEDAULATAN RAKYAT			93
18	BPPKAD	Han' hmb' hmb'	Ka. Bad Nuntan	94
19	DPU TABU	Mugoko	Ka. G'uy	95
20				96
21				97
22				98
23				99
24				100
25				101
26				102
27				103
28				104
29				105
30				106
31				107
32				108
33				109
34				110
35				111
36				112
37				113
38				114
39				115


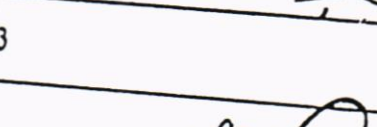
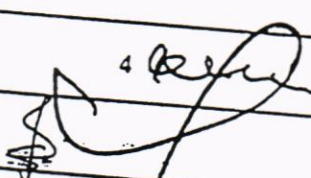


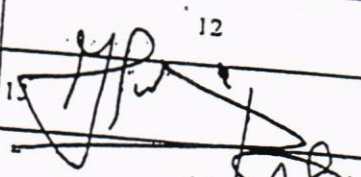
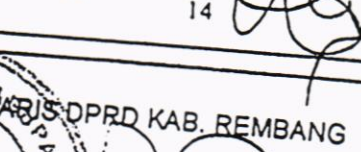
DAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
			119
			120
22			121
23			122
24			123
			124


 PEMERINTAH KABUPATEN
 SEKRETARIS DERO KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 196208041988031011

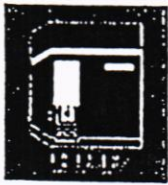
DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN
 UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
 HARI/TANGGAL : RABU, 21 JUNI 2017

PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Subarso	
2	CAMAT KALIORI	Muhammad	
3	CAMAT SUMBER		
4	CAMAT SULANG	Stewart H	
5	CAMAT BULU	Taswadi	
6	CAMAT PAMOTAN	W. Widyad	
7	CAMAT GUNEM		
8	CAMAT SALE	Kurnia	
9	CAMAT LASEM		
10	CAMAT PANCUR		
11	CAMAT SEDAN		
12	CAMAT SLUKE		
13	CAMAT KRAGAN	M. ARIEF	
14	CAMAT SARANG	Eddy Prasetya	

REKORSEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Dr. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Rabu , 21 Juni 2017

Dibacakan oleh : Zaimul Umam NS

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan
para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2016, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, pada rapat paripurna Senin, tanggal 19 Juni 2017 lalu, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya, yakni realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 mencapai 92,50 %, dan realisasi APBD tahun anggaran 2015 hanya mencapai 73,37 %, Walaupun sampai saat ini, masih banyak hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Dan berharap untuk realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017 ini, dapat meningkat lebih baik lagi.

Dalam kesempatan yang baik ini, dan kebetulan masih di dalam bulan Romadlon, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa sampai dihari yang ke 26 ini, semoga semua amal ibadah kita diterima, dan mendapat Ridlo ALLAH SWT., Amiin.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Sehubungan dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD, untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan hasil LHP BPK atas Laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun 2016, bahwa dari hasil Pemeriksaan BPK tersebut, Pemkab Rembang masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena dalam LHP BPK masih ditemukan beberapa kelemahan tentang pengendalian internal, dan juga adanya temuan tentang ketidak patuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada. Dan menurut pendapat serta masukan dari beberapa pihak, bahwa Pemkab Rembang sudah layak menerima predikat opini WTP. Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong dan meminta kepada Pemkab Rembang, agar meningkatkan kinerja yang lebih serius dan melakukan langkah-langkah strategis, supaya di tahun mendatang Pemkab Rembang mendapatkan status Opini WTP.
2. Terkait dengan masih banyaknya kekosongan perangkat desa, di Pemerintah desa se kabupaten Rembang, dan hal ini berakibat kurang maksimalnya kinerja dan pelayanan pemdes, pada masyarakat di desa, untuk itu Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar Pemkab segera melaksanakan sosialisasi, terhadap Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sampai di tingkat desa, dan mohon agar di dalam tahun 2017 ini, pengisian Perangkat desa dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
3. Terkait dengan adanya kasus tukar guling tanah kas desa (tanah bengkok) di desa Punjulharjo kecamatan kota Rembang, yang proses pelaksanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga sampai sekarang masih belum terselesaikan, dan hal ini cukup meresahkan warga masyarakat desa setempat yang terlibat, maka sehubungan dengan perkara tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar Pemkab Rembang melakukan langkah pro aktif, supaya permasalahan tanah tersebut dapat segera selesai tuntas.
4. Sehubungan dengan ruas jalan Pamotan – Clangapan Rembang, yang status sekarang masih *jalan Kabupaten*, untuk mengurangi beban Pemkab Rembang, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan *mengusulkan*, agar Ruas jalan tersebut diajukan statusnya *menjadi Jalan Propinsi*, karena ruas jalan Lasem – Sale/batas Jatim, sudah status Jalan kewenangan Pemerintah Propinsi. Hal ini penting karena Pemkab Rembang, masih banyak sekali kegiatan infra struktur, yang harus ditangani, terutama sarana prasarana perhubungan, yakni jalan antar kecamatan, jalan antar desa, dan juga jalan antar desa di wilayah pinggiran, yang mesti harus dilakukan perbaikan maupun peningkatan.
5. Berkaitan dengan masih lambannya kegiatan pelaksanaan APBD 2017, terutama bidang infra struktur Jalan dan Kelengkapannya, juga bidang-bidang yang lain, agar progress capaian serapan Anggaran tidak menumpuk di bulan-bulan ahir

tahun anggaran, kami Fraksi PPP minta , agar sdr. Bupati melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan diseluruh OPD .

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016. Akhirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamittorik.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 21 Juni 2017

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



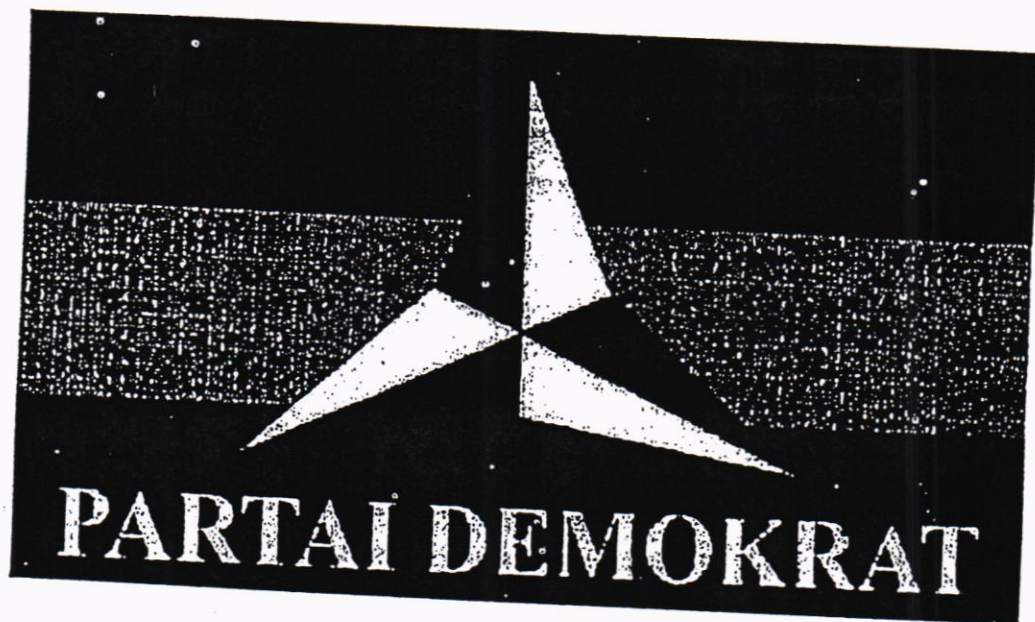
SUGIHARTO

SEKRETARIS



ZAIMULUMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2016**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 21 JUNI 2017

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

RABU, 21 JUNI 2017

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan berkah

kepada kita semua sehingga kita bisa hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga dibulan yang penuh berkah ini kita bekerja dengan semangat baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Secara umum kami memberi apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja PEMKAB Rembang pada tahun 2016, walau masih banyak kendala dan kekurangan di mana-mana terutama dengan masalah SKPD yang sebagian besar masih ogah melaksanakan kegiatannya.

Sehingga Bupati menjadwalkan rapat SENENAN dengan SKPD terkait penyerapan kegiatan sehingga bisa mencapai 80,79 persen terealisasi. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah angka yang belum terserap sekitar 80 milyar rupiah. Sehingga dari angka tersebut sebenarnya masih sangat bisa untuk menata infrastruktur dirembang yang sangat rusak parah.

Tetapi yang paling mencolok adalah kesemrawutan kinerja SKPD waktu itu sangat terasa.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dalam kesempatan ini, kami memberi beberapa masukan untuk ditindak lanjuti, diantaranya :

1. Pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Rembang yang cukup tinggi alangkah baiknya apabila pendapatan yang besar ini dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraannya.
2. Kinerja OPD masih sangat lamban sehingga program yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Mengingat banyaknya anggaran yang masuk ke wilayah pemerintahan desa perlu penanganan manajemen yang lebih profesional untuk itu dimohon kepada Bupati Rembang untuk segera menerbitkan PERBUP yang berhubungan dengan pengisian perangkat desa yang kosong sehingga lebih cepat menangani permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut.
4. Pelaksanaan kegiatan masih belum bisa direalisasikan pada triwulan I atau triwulan II bahkan pada triwulan III, sehingga diakhir tahun masih kejar-kejaran.
5. Perlu adanya perencanaan kegiatan yang matang, ini bisa study komparasi dari Kabupaten-kabupaten lain yang sudah memakai sistem T-1 (satu tahun sebelum anggaran dimulai) sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat dan tidak terkatung-katung.
6. Program penanggulangan kemiskinan masih belum tepat sasaran dan kurang bisa menekan angka kemiskinan.
7. Perlu secepatnya pengerjaan dan pemeliharaan jalan, trotoar khususnya di Kecamatan Kota, kami berharap kepada dinas terkait untuk segera meninndak lanjuti.
8. Kami berharap untuk hibah dan bansos supaya secepatnya direalisasikan dan dilaksanakan.
9. Perlu meningkatkan komunikasi / kerjasama antara eksekutif dan legislatif guna membangun sistem yang profesional.
10. Dibidang kesehatan : Pelayanan di RSUD Rembang sangat memprihatinkan, khususnya diloket pendaftaran dimana pasien bisa mengantri berjam jam hanya untuk mendapatkan nomor ke poliklinik yang di tuju.
11. Perlu adanya penataan terhadap guru-guru SD, karena saat ini dibeberapa SD di kota Rembang dan Lasem hampir terpenuhi

kebutuhannya, sementara dikecamatan lain banyak SD yang kekurangan guru.

12. Mohon agar penanganan terhadap masyarakat penderita HIV lebih di tingkatkan agar tidak semakin menular, karena dari laporan yang ada penderita HIV di Rembang cenderung meningkat.
13. Mohon agar potensi wisata bisa dikelola dengan profesional, bila perlu mengundang konsultan sesuai dengan bidangnya supaya bisa mengelola secara profesional dan akuntabel.
14. Kami menagih janji bupati terkait dengan para pejabat dilingkungan Pemkab Rembang yang tidak mau bekerja dengan baik akan di kenakan sanksi, sampai dengan masuk triwulan 3 tahun 2017 ini belum ada realisasinya padahal ada yang benar benar tidak mau bekerja.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Rembang, 21 Juni 2017

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS




EKA SISWA KARTIKA


IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

disampaikan oleh

H. Subawoto

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang Rabu 21 Juni 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum ini pertama-tama perkenankan kami menyampaikan selamat hari Pancasila yang jatuh pada hari Kamis 1 Juni 2017 lalu yang telah kita peringati dan telah dinyatakan sebagai hari libur Nasional.

Hari Pancasila adalah hari lahirnya Pancasila sebagai satu-satunya sebuah ideologi dan dasar Negara yang hanya di miliki oleh bangsa Indonesia di dunia , oleh karena itu Pancasila tak hanya dijadikan untuk sebuah hafalan semata bagi penduduk di Republik ini namun wajib kita amalkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada lima sila dalam Pancasila.

Kedua kalinya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Bupati dan wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yaitu menyampaikan LKPJ Bupati Rembang tepat waktu pada tanggal 21 Juni 2017 . Dan kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah menindaklanjuti dengan agenda pembahasan LKPJ Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku , Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 3 Tahun 2007 . Artinya kepala Daerah dan DPRD dituntut taat aturan , ketaatan ini akan sangat berdampak positif terhadap agenda dan Pemerintahan yang lain. Ketaatan pada aturan dan jadwal penyampaian LKPJ dan pembahasan oleh DPRD merupakan salah satu indikator positif atas kerja dan kinerja pemerintahan dan pembangunan Daerah yang lebih baik dan taat aturan, Semoga praktek ini menjadi tradisi yang baik dan terus berlanjut pada periode yang akan datang.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati dalam Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun 2016 ini, bahwa untuk realisasi Pendapatan terpenuhi 104,98% , Sedangkan untuk Belanja terealisasi sebesar 92,50 %..

Dalam forum yang mulia ini, mari kita bersama sama menyamakan persepsi agar Belanja Daerah yang menjadi inti pelaksanaan pembangunan di Rembang ini dapat memenuhi capaian yang wajar. Realisasi Belanja yang hanya mencapai 92,50% menunjukkan kinerja birokrasi di Rembang yang hampir mencekati profesional.

APBD 2016 seperti bagian dari "ketakutan" untuk mendistribusikan anggaran yang telah ditetapkan pada Perda APBD. Sebuah ketakutan yang berlebih-lebihan yang sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan kita kurun satu dasa warsa. Kita dininabobokan oleh fasilitas fasilitas yang sesungguhnya milik publik.

Bukankah sumpah dan jabatan yang kita laksanakan telah kita ucapkan secara lantang karena naiknya jabatan kita. Bukankah kita paham dengan tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing masing. Di sinilah seorang pemimpin harus tegas!!!

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD tahun 2016 telah diatur sebagaimana dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2016, terutama untuk sinkronisasi kebijakan Pemkab dengan Kebijakan Pemerintah. Hal ini untuk mengeliminasi kesenjangan program karena tidak adanya GBHN.

Begitu pula tentang tentang Pertanggungjawaban APBD 2016 sesuai dengan ketentuan PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi ini bukan sekedar memenuhi ketentuan hitam di atas putih, tetapi untuk mengukur capaian kinerja setiap daerah. Apakah APBD yang dikelola dapat optimal atau justru diselewengkan. Karenanya dalam pasal 101 PP ini Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota harus diserahkan kepada BPK paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir.

Dari ketentuan ini seharusnya APBD berpihak kepada kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para elit atau para pejabatnya. Seringkali kita tak mampu membedakan antara KEBUTUHAN dan KEINGINAN.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mulyakan

Perkenankan kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kami, antara lain;

1. Saudara Bupati selaku Kepala Daerah agar supaya menunda wacana untuk membebaskan potongan Rp.100,000/bulan bagi ASN untuk anak yatim , kami berharap hal ini tidak menjadi kewajiban bagi ASN namun dilakukan secara sukarela oleh ASN melalui Lembaga Amil Zakat seperti BAZNAZ , LAZISNU dan sebagainya
2. Agar manargetkan hasil laporan pertanggungjawaban kepada BPK dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian) karena selama ini hasil laporan pemkab Rembang selalu WDP (wajar dengan pengecualian)
3. Mengoptimalkan seluruh potensi agar Daya Saing kabupaten Rembang semakin kuat.

Berikut kami sampaikan catatan atas Pertanggungjawaban APBD tahun 2016 :

1. Pemkab Rembang agar membentuk satuan tugas (Satgas) dalam melaksanakan penataan dan pencatatan asset dan bekerja sama dengan BPKP serta seluruh pengurus barang di setiap OPD
2. Pemkab Rembang segera mengantisipasi kelemahan kelemahan desa dalam menyusun dokumen dokumen pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban desa. Hal ini dapat dilihat melalui monitoring dan evaluasi tahun 2016 yang dilakukan oleh kecamatan bahwa masih banyak desa yang salah bahkan disclamer dalam melaksanakan pembangunan.
3. Sebagaimana di atas kami mengajak kepada segenap pemangku kebijakan untuk memprioritaskan anggaran perbaikan jalan antar kecamatan. Agar Saudara Bupati memberikan perhatian khusus kepada Dinas PU yang serapan anggarannya minim.
4. Inspektorat Kabupaten Rembang agar melakukan pemutakhiran data terhadap seluruh DPA di setiap OPD untuk menghindari potensi temuan yang muncul.

5. Pemkab harus melakukan Revitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar benar-benar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tegas dan adil mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi
6. Pemkab harus membuat standar kualitas bangunan dengan menetapkan standar garansi dalam hitungan tahun sebagai suatu persyaratan yang harus dituangkan dalam Memorandum of Understanding dengan rekanan atau pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan
7. Pemkab agar menyusun urutan daftar serapan OPD terhadap APBD Rembang baik untuk tahun 2016 ataupun tahun berikutnya dengan memberikan reward and punishment lewat system aplikasi central
8. Menindaklanjuti hasil temuan BPK yang hasilnya sudah diberikan kepada Pemkab Rembang yang hari Senin kemarin telah dipaparkan

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

Sebagai penutup pemandangan umum ini perkenankan kami menyampaikan dawah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) " Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk kepada kenyataan, asal kita yakin dan selalu membela yang benar "

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 21 Juni 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Sekretaris

Alyas

Ketua

Muhammad Imron



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP :

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati beserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan Wartawan, Ormas, Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat Paripurna dengan acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD TA, 2016. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan selamat menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan tahun ini, semoga ibadah dan semua yang kita laksanakan pada hari ini dicatat ALLAH SWT sebagai amal sholeh bagi kita semua..Amin Amin Ya Robbal Alamin.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Dalam kesempatan kali ini kami dari Fraksi PDIP Nasdem akan menanggapi apa yang telah disampaikan saudara Bupati dalam Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD 2016 pada sidang Paripurna kemarin. Ada beberapa hal yang menjadi catatan yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, agar menjadi perhatian saudara Bupati beserta jajarannya dalam pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang, hal - hal tersebut diantaranya :

1. Terkait hasil LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun 2016, bahwa dari hasil pemeriksaan BPK tersebut Pemkab Rembang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena dalam LHP BPK masih di temukan ketidak patuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang ada sehingga Pemkab Rembang perlu mendorong agar bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong agar pemkab Rembang bisa meningkatkan kinerjanya dan melakukan percepatan pembangunan untuk tahun ini dan yang akan datang.

2. Dalam LHP BPK masih ditemukan aset Pemkab yang belum didata secara menyeluruh di masing-masing OPD tersebut, sehingga sampai saat ini Pemkab Rembang masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami berharap Pemkab Rembang membenahi secara serius dalam hal pendataan aset Pemkab yang ada di OPD agar tidak ditemukan lagi kejanggalan dalam pemeriksaan BPK yang akan datang.
3. Dengan adanya Direktur RBSJ yang baru kami Fraksi PDI perjuangan Nasdem berharap Pemkab Rembang segera mengambil peran untuk mendorong kinerja RBSJ agar perusahaan ini kedepannya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan pembangunan di Kab. Rembang. Kami sangat menaruh harapan yang besar terhadap Direktur RBSJ yang baru bisa membawa perusahaan daerah ini kan lebih berkembang dan maju lagi.
4. Dengan adanya keluhan dari masyarakat tentang kualitas air PDAM kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap agar Pemkab Rembang segera ada perbaikan jaringan sehingga kualitas air PDAM di Kab. Rembang bisa lebih baik lagi dan tidak keruh. Harapan kami, masyarakat yang sudah membayar rekening dapat terlayani dengan kualitas air yang baik.
5. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap Pemkab Rembang bekerja lebih keras lagi untuk mempercepat upaya pembangunan terutama dibidang infrastruktur dan kelengkapannya serta bidang-bidang yang lain, Karena kami beranggapan di tahun 2017 ini Pemkab Rembang masih lamban dalam upaya pembangunan infrastruktur ini. Sehingga penyerapan anggaran di tahun 2017 ini masih minim.
6. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem sebagai mitra kerja dari DPRD berharap jajaran OPD yang ada di Kab. Rembang untuk pro aktif jika sewaktu- waktu DPRD yang terdiri dari komisi- komisi di panggil dalam upaya pembahasan APBD. Karena sering terjadi OPD ada yang tidak mau memenuhi surat undangan dari komisi, ini sangat tidak mendukung dalam upaya DPRD untuk melakukan fungsi control terhadap kinerja eksekutif.
7. Untuk ke sekian kalinya kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem masih menyoroti pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Soetrasno yang masih saja adanya laporan masyarakat tentang kurang maksimalnya pelayanan yang ada. Mohon ini untuk menjadi perhatian.

8. Dengan adanya kasus penganiayaan seorang oknum Kepala Sekolah terhadap seorang guru, ini menjadi perhatian kami. Guru yang seharusnya bisa di "Gugulan di Tiru" sampai melakukan tindakan seperti itu sungguh kami sayangkan. Kami berharap Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari.
9. Kami juga menyoroti dalam rangka keterbukaan informasi di masyarakat melalui Pemkab Rembang untuk memberi pengarahan kepada setiap desa agar memasang papan informasi yang berisi tentang Anggaran desa dan penggunaannya. Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran desanya dan untuk apa anggaran tersebut di gunakan.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami sampaikan terhadap Raperda Pelaksanaan APBD 2016, semoga menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua.

MERDEKA!!!

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA

JASMANI



WINDO DE

SEKRETARIS

Ali Ircham ST
ALI IRCHAM ST

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 21 Juni 2017

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Disampaikan oleh H.YUDIANTO, SH
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 21 Juni 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua
Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-
POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat
dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-
Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para
Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan
Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan
puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga
pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan rapat

paripurna pada hari ini dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, kami fraksi Gerindra mengucapkan marhaban ya ramadhan, selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang mulia, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita. *Amin ya robbal alamin*

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Sehubungan dengan pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan untuk tahun 2016 telah melampaui target yang telah ditentukan. Itu artinya kedepan dalam menentukan proyeksi PAD harus benar-

benar diperhitungkan secara matang dan memperhatikan kajian potensi PAD disegala sektor yang ada dikabupaten rembang secara teliti agar pendapatannya bisa dioptimalkan.

2. Kami juga mengapresiasi realisasi capaian kinerja dari pemerintah daerah kabupaten rembang yang rata-rata mencapai 92,50 persen, itu artinya ada kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Tetapi sayangnya, prestasi itu tidak diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum yang hanya mencapai 86,68 persen. Tentunya ini berdampak pada kurang maksimalnya pembangunan di kabupaten rembang. Kita bisa lihat di sisa anggaran untuk pembangunan jalan yang masih cukup besar yaitu 14,05 milyar dan anggaran pemeliharaan rutin yang masih tersisa 6,95 milyar. Total anggaran 21 milyar yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan untuk mendukung program jalan mulus dari bupati rembang, malah anggaranya berdiam diri di kas daerah. Itu artinya kinerja dinas pekerjaan umum tidak maksimal dan tentunya kedepan harus dievaluasi agar tidak terulang kembali.
3. Fraksi gerindra menyoroti lemahnya kinerja dari Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU, karena minim pengusulan dan minim prestasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengairan di Kabupaten Rembang. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Rembang mayoritas

penduduknya adalah petani. Untuk menunjang swasembada Pangan diperlukan Pengelolaan Pengairan melalui Embung – embung , Cekdump , dan Jaringan Irigasi agar Petani bisa tanam secara rutin tanpa harus mengalami kesulitan Pengairan. Hal ini Mutlak diperlukan agar Petani bisa Hidup lebih sejahtera.

4. Besarnya Silpa diangka 214,8 milyar, kami anggap masih terlalu tinggi, kedepan kami mengharapkan bisa diperkecil lagi, agar anggaran bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten rembang.
5. Bahwa Anggaran di tahun 2016 belum menunjukkan Arah Kebijakan Bupati dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi Riil yang berbasis Kerakyatan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kebijakan penganggaran yang terintegrasi antara Bupati dan OPD selaku Pelaksana tugas dari Kebijakan Anggaran, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, hampir sepanjang tahun anggaran 2016 tidak ada kegiatan yang berupa pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada UMKM dan Kelompok- Kelompok Masyarakat kecil Lainnya yang secarar Riil mempunyai Usaha Yang Mandiri dan Berdikari ditengah – tengah masyarakat ,sehingga Cita-cita untuk menggerakkan dan memberdayakan sektor Ekonomi Riil / UMKM menjadi tidak pernah tercapai . Oleh karena itu kami

Fraksi Gerindra minta penjelasan kepada Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati .

6. Bahwa ditahun Anggaran 2016 khususnya di Bidang Yang Menjadi Tupoksi OPD Kelautan dan Perikanan kurang adanya Breakdown Anggaran yang kuat dan seimbang oleh Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten terhadap Kegiatan – kegiatan yang bersumber dari APBN , sehingga kegiatan yang di danai oleh APBN menjadi muspro dan kurang bermanfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan , misalnya Kegiatan Bantuan Kepada Petani garam (PUGAR) yang jumlahnya mencapai angka Milyardt dan karena kurang didukung oleh Anggaran dari APBD Kabupaten ditahun Anggaran 2016 misalnya berupa pelatihan – pelatihan kepada petani Garam tentang bagaimana Pengolahan Pembuatan Garam secara baik dan benar , sehingga Program Pugar yang didanai oleh Pemerintah Pusat menjadi tidak maksimal .
7. Untuk Mendukung Program *E – Planning* dan *E-Budgeting* kami meminita kepada Kepala Daerah agar Perencanaan Pekerjaan fisik yang ada di semua Dinas bisa dikerjakan pada Tahun - 1 (T- 1) , hal ini sangat penting dilaksanakan agar memudahkan dalam pembahasan Anggarannya bisa Tepat dalam menentukan jumlah Volume pekerjaan di awal Anggarannya , Pekerjaan bisa langsung dikerjakan di awal tahun tanpa harus menunggu Perencanaan terlebih dahulu .

sehingga prestasi serapan Anggaran tidak Mbendol di akhir Tahun.

8. Pada Kegiatan Penataan Daya tarik wisata di lingkungan Obyek Wisata pantai Binangun Kecamatan Lasem yang terdiri dari Pembangunan Musholla , Kios ,Gazebo , MCK, Gedung Kesenian dan Penataan Lingkungannya yang dalam Temuan BPK adanya Kelebihan bayar sebesar 110,4 juta, agar segera diselesaikan. Kami berharap dinas pariwisata segera mengatur pengelolaannya, agar bermanfaat sesuai rencana. Jangan hanya bisa membangun, tetapi tidak bisa mengelolanya. Akhirnya sama seperti gedung yang ada disebelah utaranya, mangkrak, tidak terawat, banyak disalahgunakan fungsinya, bau, mengganggu pemandangan bahkan mungkin menjadi omah gendruwo. Mohon bapak Bupati serius dalam mengelola bangunan yang sudah jadi dengan memberdayakan masyarakat disekitarnya.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juni 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua

PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2016



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rumbaing - Telp (0295) 693290



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Rabu, tgl 21 Juni 2017

Juru Bicara :

GATOT PAERAN, SH, MSi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang berbahagia

Dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi kali ini, perkenalkanlah kami, Fraksi Karya Sejahtera mengajak para hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini. Dalam suasana puasa ini perkenalkanlah kami mengucapkan: "Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amalan kita diterima oleh Alloh SWT".

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Perkenalkanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah disampaikan oleh Sdr. Bupati tanggal 19 Juni 2017 yang lau sbb,

1. Dalam Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Th 2016, kami mengamati Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat minimalis:

- PAD dari Pajak Daerah yang pada TA 2015 terealisasi Rp. 42.306.285.806,- mengapa target pada TA 2016 justru diturunkan menjadi Rp. 41.678.500.000,- ?
- PAD dari Retribusi Daerah yang pada TA 2015 terealisasi Rp. 32.227.998.903,- mengapa target pada TA 2016 justru diturunkan menjadi Rp. 20.893.370.500,- ?

Hal ini merupakan target yang minimalis dengan capaian yang juga minimalis, artinya ini adalah sekedar taktik untuk mengamankan syarat agar mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai belaka.

2. Pada sektor belanja, Rencana Belanja Daerah sebesar Rp. 1.874.875.616.269,- terrealisasi sebesar Rp. 1.734.304.081.928,58 atau 92,5 %. Tetapi apakah belanja sebesar ini sudah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, antara lain:

- Seberapakah tingkat kemiskinan masyarakat menurun?
- Seberapakah pertumbuhan ekonomi meningkat?
- Seberapakah "genie ratio" (tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin), mengecil ?

3. Mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Rembang selalu mendapat opini WDP (wajar dengan persyaratan) dari temuan yang itu itu saja, antara lain:

- Persoalan pengelolaan aset daerah yang tidak pernah ada jalan keluarnya.
- Kesulitan menyetor retribusi ke Kas Daerah.
- Persoalan pembangunan Pasar Sedan yang belum tuntas.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat,

Mengakhiri pemandangan umum ini kami menyampaikan sebuah Piweling Jawa sbb. "*Kang kasebat ing gesang ambeg linuhung iku wong kang bisa aménaki sasama, nora hamung ngugemi kepeentingané dhéwé*". Artinya, yang disebut dengan hidup luhur itu adalah orang yang bisa membahagiakan sesamanya, tidak hanya untuk kepentingannya sendiri.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejahtera, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, S.H.

**FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016**

Dibacakan Oleh : NUR JANNAH

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.
Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati pada Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T.A 2016 beserta lampiran-lampirannya, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal agar yang sekiranya perlu dicermati dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran atau Komisi.:

1. Perlu diperhatikan capaian atau *outcome* pada pelaksanaan anggaran di masing-masing kegiatan.
2. Laporan Pertanggungjawaban adalah gambaran kinerja masing-masing OPD sebagai sebuah *teamwork*. Tingkat capaian, penyerapan anggaran, kondusifitas kerja adalah sebuah gambaran sejauh mana Aparatur Sipil Negara memahami tupoksi, visi misi Bupati dan Wakil Bupati, komitmen untuk menjaga rencana-rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan etos kerja untuk mencapai hal tersebut.
3. Kami mengajak segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mencermati Laporan Pertanggungjawaban ini dengan menggali tantangan, kendala dan target capaian pada tahun ini.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

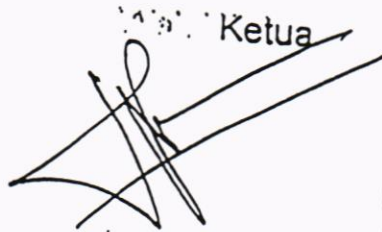
Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 21 Juni 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


SUKARMA'IN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juni 2017
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
 3. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 13 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, karena atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2017 kita kembali bertemu dalam keadaan sehat wal-afiat, untuk melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dengan agenda pokok Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Ketiga hari ini, adalah sama dengan yang berlaku dalam Rapat Paripurna Pertama maupun Rapat Paripurna Kedua membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 32 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat paripurna ketiga ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan dalam rapat paripurna kedua tanggal 21 Juni 2017 kemarin.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

Kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Kepada Saudara Bupati , waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya.

==JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ==

➤ *(Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama, penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Dengan telah disampaikannya jawaban bupati

atas pemandangan umum fraksi, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini.

Untuk kelanjutan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, akan dimulai kembali setelah Lebaran 1 Syawal 1438 H, tepatnya tanggal 4 Juli 2017 dalam Rapat Badan Anggaran dan TAPD serta Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi.

Akhirnya, dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

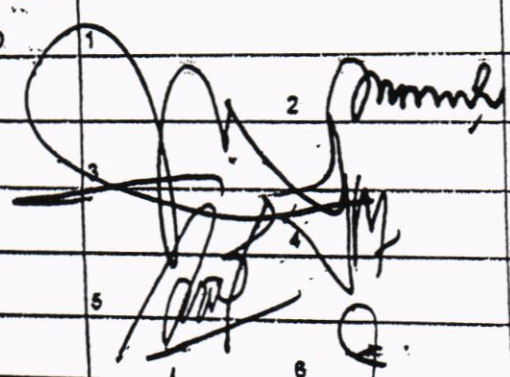
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

DAFTAR BAWAH
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : KAMIS, 22 JUNI 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARJANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGTYARTO, S.T.	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

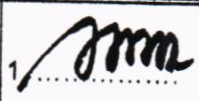
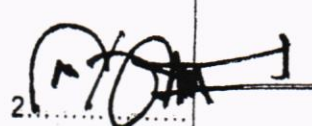
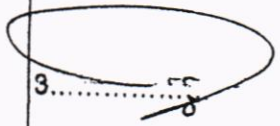
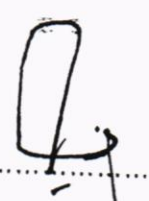
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA,

H. MAJID KAMIL.MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : KAMIS, 22 JUNI 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	
3	R. PRABOWO AJI SASMITO, S.S, M.H <i>Prabowo</i>	Kejaksaan Negeri Rembang	
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	Dandim 0720 Rembang	5.....
6	RIWAYAT SOSIYANTO	WaKa. Kepolisian Resort Rembang	6.....
7	Drs. MAHZUMI, M.H <i>QOSIM</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.....

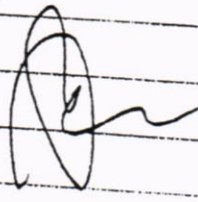
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Setwan
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 22 JUNI 2017

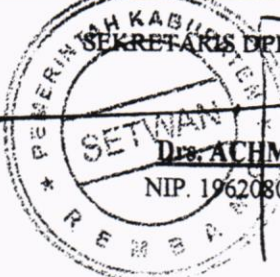
PUKUL : 11.00 WIB

10	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Non affendi	BAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Kar Tom	EAB	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ahmad		8
9	BAG. HUKUM	Eddy Diplo P	Bag.	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautama		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
16	BPPKAD	Mustin	Kabun	16
17	INSPEKTORAT	SRI WATI XI	SEKRETARIS	17
18	BAPPEDA	Drupodo	Secretaris	18
19	DINPERMADES	H. WALLYO	Kodes	19
20	BKD			20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	Sri Sugiyarti	DPMPSPNAKER	21
22	B P B D			22
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyolito	Secret	25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN	Surana		28
29	DINLUTKAN	Suparman	Kadin	29
30	DISKOMINFO	Suranto	BU	30
31	DINAS PERHUBUNGAN			31
32	DINAS DUKCAPIL	Elco Harjanto	Kari	32
33	DINSOSIAL P2 KB	Dwi Wahyuni	Kand	33
34	DINBUDPAR	Dwi Purwati		34

1	2	3	4	5
	ADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	DPD PAN			77
	DPC PARTAI HANURA			78
	DPC PKS			79
	DPC PARTAI NASDEM			80
	DPC PARTAI GERINDRA			81
	DPC PKB			82
	DPC PDI PERJUANGAN			83
	SUARA MERDEKA	Mulyanto	Wkhan.	84 Muly
	CAKRA TV			85
	RADIO CBFM			86
	RADIO R2B			87
	MAJALAH BANGKIT			88
	PATI EKSPRESS			89
	RADIO MATA AIR			90
	WIMBAR RAKYAT			91
	CARAKA CANDI			92
	KEDAULATAN RAKYAT			93
	Lsm JAWA ABANG	BUSNO	Ketua	94 
				95
				96
				97
				98
0				99
1				100
2				101
3				102
4				103
5				104
6				105
7				106
8				107
9				108
0				109
1				110
2				111
3				112
4				113
5				114

1	2	3	4	5
	ADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	DPD PAN			77
	DPC PARTAI HANURA			78
	DPC PKS			79
	DPC PARTAI NASDEM			80
	DPC PARTAI GERINDRA			81
	DPC PKB			82
	DPC PDI PERJUANGAN			83
	SUARA MERDEKA	Mulyanto	Wkhum	84 Muly
	CAKRA TV			85
	RADIO CBFM			86
	RADIO R2B			87
	MAJALAH BANGKIT			88
	PATI EKSPRESS			89
	RADIO MATA AIR			90
	MIMBAR RAKYAT			91
	CARAKA CANDI			92
	KEDAULATAN RAKYAT			93
	LSM JAWA ABANG	BUSNO	Utua	94
				95
				96
				97
				98
				99
				100
				101
				102
				103
				104
				105
				106
				107
				108
				109
				110
				111
				112
				113
				114

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
			119
0			120
1			121
2			122
3			123
4			124

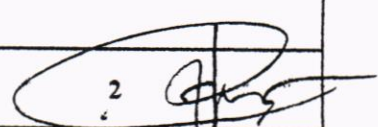
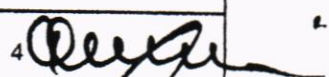


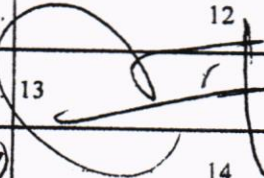
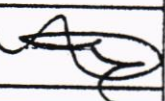

 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Des. **ACHMAD MUALIF**
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016

HARI/TANGGAL : KAMIS, 22 JUNI 2017

PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	M. Rokhim	2 
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryand	4 
5	CAMAT BULU	Tas. we. 8i	5 
6	CAMAT PAMOTAN	W. Wiyoto	6 
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	MASHAD	13 
14	CAMAT SARANG	Eddy. Isewanto	14 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
Dr. Achmad Mualif
NIP. 19620804 198803 1 011



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
KABUPATEN REMBANG**



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato jawaban kami atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan dan tak kurang suatu apa.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 terdiri atas Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.490.592.742.455,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.564.868.839.955,55 atau 104,98%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.874.875.616.260,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.734.304.081.928,58 atau 92,50%

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.396.607.873.805,00 realisasinya sebesar Rp.396.607.873.805,61 atau 100,00% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.12.325.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.12.296.725.422,00 atau 99,77%

Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan-catatan yang berkembang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang, berikut saya sampaikan jawaban dan/atau klarifikasinya :

1. Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan

- a. HASIL LHP BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMKAB REMBANG TAHUN 2016 YANG MASIH WDP DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya, terkait dengan hasil opini atas LHP BPK TA 2016 yang masih WDP, karena masih adanya pengecualian di pengelolaan asset tetap. Namun demikian secara bertahap sesuai dengan rekomendasi BPK, telah kami lakukan tahapan – tahapan tindak lanjut LHP BPK, mulai dari proses rekonsiliasi asset tetap audited, menyelesaikan hasil penelusuran asset yang telah dilaksanakan di TA 2016, proses alih pencatatan antar OPD yang baru (penataan asset OPD setelah SOTK baru), dimana di tingkat teknis kami lakukan tahapan- tahapan sebagai berikut :

- Tahap I : Inventarisasi administrasi asset
- Tahap II : Penginputan data hasil inventarisasi administratif asset ke dalam Program Aplikasi SIMDA_BMD
- Tahap III : Inventarisasi fisik asset sesuai dengan KIB yang dihasilkan dari Program Aplikasi SIMDA_BMD
- Tahap IV : Penataan dokumen asset dan pengeditan database pada Program Aplikasi SIMDA_BMD berdasarkan

hasil inventarisasi fisik

Tahap V : Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan asset

Dan melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut LHP BPK sesuai rekomendasinya baik di lingkup SPI dan Kepatuhan, agar capaian opini WTP dapat diraih di LKPD tahun berikutnya.

Juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan tersebut telah dilakukan kerja sama dengan BPKP perwakilan Jawa Tengah. *(sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan – Nasional Demokrat)*

b. TERKAIT MASIH BANYAKNYA KEKOSONGAN PERANGKAT DESA DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa pengisian Perangkat Desa akan dilaksanakan tahun 2017 secara keseluruhan, dan untuk Desa yang belum menganggarkan pada APBDesa induk akan kami perintahkan untuk menganggarkan pada APBDesa Perubahan serta dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, melalui kegiatan-kegiatan ada. *(sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Demokrat)*

c. KASUS TUKAR GULING TANAH KAS DESA (TANAH BENGKOK) DI DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KOTA DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Pemkab siap untuk memfasilitasi proses tukar guling tanah kas Desa Pujulharjo, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mengingat proses tukar guling tanah kas Desa yang bukan untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

d. DAN TERKAIT RUAS JALAN PAMOTAN - CLANGAPAN YANG STATUSNYA MASIH JALAN KABUPATEN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Akan kami perhatikan dan lakukan proses kajian terhadap status jalan.

e. MASIH LAMBANNYA KEGIATAN PELAKSANAAN APBD 2017, DALAM HAL INI BIDANG INFRA STRUKTUR JALAN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Berupaya semua kegiatan berjalan dan dipercepat untuk tidak terjadi penumpukan proses penyerapan diakhir tahun dengan mempercepat proses pengadaan langsung konsultan perencanaan sehingga proses pengadaan konstruksi fisik berjalan secepatnya.

2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

a. PERIHAL PENDAPATAN YANG DIPEROLEH PEMKAB REMBANG YANG CUKUP TINGGI SEBAIKNYA DIBELANJAKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DEMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, Akan kami perhatikan.

b. DAN TERKAIT KINERJA OPD MASIH LAMBAN SEHINGGA PROGRAM YANG DIRENCANAKAN TIDAK BERJALAN SESUAI HARAPAN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa di awal tahun 2017 dilaksanakan penataan OPD sesuai dengan SOTK baru sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap program kegiatan yang ada, namun demikian untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan langkah-langkah yang optimal dalam mengevaluasi dan pengawasan melalui pembentukan Tim Penyerapan Anggaran, rapat seninan; dan TP4D sehingga kegiatan tidak jadi satu di akhir tahun.

c. TENTANG PERENCANAAN KEGIATAN APBD PERLU STUDY KONPARASI KE KABUPATEN LAIN YANG SUDAH MEMAKAI SISTEM T-1 (SATU TAHUN SEBELUM ANGGARAN DIMULAI)

Saya setuju dengan usulan Saudara, dan penyusunan perencanaan teknis pada T-1 (pada 1 tahun sebelum tahun anggaran) sudah mulai kami anggarkan di beberapa SKPD, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat terkendala regulasi pengadaan jasa konsultasi. Untuk selanjutnya akan kami tingkatkan baik anggaran perencanaan teknis maupun realisasi pelaksanaan kegiatannya, sehingga ketika awal tahun anggaran penyusunan dokumen lelang akan lebih cepat dan proses lelang bisa dilaksanakan lebih awal. (Sekaligus Menjawab Pertanyaan Fraksi Gerindra)

d. UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH BELUM TEPAT SASARAN DAN KURANG BISA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus didukung semua pihak, baik pemerintah, swasta, dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Kami trs berupaya utk lebih mengoptimalkan peran Tim Kōrdinasi Penanggulangan Kemiskinam Daerah (TKPKD) agar program penangglan kemiskinan bisa berjalan terkoordinasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Dalam rangka abiding data kemiskinan PBDT 2015 kami sedang mempersiapkan sistem

Metode Pemutakiran Mandiri (MPM), sehingga diharapkan bisa memperbaiki akurasi data yang sudah ada. Disamping itu kami mempersiapkan juga bentuk layanan penanggulangan kemiskinan yang terpadu, sehingga dapat memudahkan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan, baik dibidang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya. Dengan langkah-langkah tersebut mudah-mudahan program penanggulangan kemiskinan dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

- e. TENTANG Pengerjaan pemeliharaan jalan dan trotoar khususnya di Kecamatan Kota agar segera ditindaklanjuti dapat kami sampaikan :

Untuk pemeliharaan rutin jalan sudah mencapai 85%, dan untuk pekerjaan Trotoar sudah pada tahap proses konsultan perencanaan.

- f. TERKAIT Hibah dan Bansos agar segera direalisasikan dan dilaksanakan dapat kami sampaikan :

Bahwa untuk anggaran hibah dan bansos TA.2017 sudah direalisasikan sesuai dengan permohonan pengajuan masing - masing penerima hibah dan bansos.

- g. TENTANG Perlunya meningkatkan komunikasi/kerjasama antara eksekutif dan legislatif guna membangun system yang professional dapat kami sampaikan :

Terimakasih atas perhatiannya.

- h. UNTUK Pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang yang sangat memprihatinkan khususnya di loket pendaftaran yang antri selama berjam-jam dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa tingkat kunjungan pasien di poliklinik rawat jalan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang pada tahun 2016 rata-rata adalah 382 pasien/hari, paling banyak pada hari Senin dan Selasa mencapai 700 pasien/hari. Untuk pelayanan pendaftaran, tersedia 7 konter terdiri dari : 5 konter pendaftaran poliklinik umum dan 2 konter pendaftaran Poliklinik Paviliun Kartini, yang buka pelayanan mulai pukul 07.15 WIB.

Untuk memperlancar pelayanan pendaftaran, pada bulan Maret 2017 RSUD dr. R. Soetrasno Rembang meluncurkan system pendaftaran menggunakan layanan pesan pendek (short message service/SMS) pada nomor 08112905222. Dan saat ini telah tersedia system pendaftaran online dengan menggunakan aplikasi pada smartphone berbasis

android. System ini sudah masuk tahap ujicoba dan siap diluncurkan pada awal Juli 2017.

System ini baru dapat melayani antrian pada konter pendaftaran, selanjutnya akan dikembangkan menjadi antrian pada masing-masing poliklinik yang tersedia. Diharapkan, dengan diluncurkan system antrian baru (via SMS dan online) ini masyarakat Rembang memiliki keleluasaan dalam melakukan pendaftaran di poliklinik RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

(sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Nasional Demokrat)

- i. PENATAAN TERHADAP GURU-GURU SD SEHINGGA KEBUTUHAN GURU TERPENUHI DI MASING-MASING KECAMATAN DAPAT KAMI JELASKAN :

Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan melaksanakan redistribusi guru berdasarkan SKB 5 Menteri Nomor 5 Tahun 2011 tentang redistribusi guru, ketentuan tersebut mengatur tentang penghitungan kebutuhan guru berdasarkan analisis beban kerja dan analisis kebutuhan guru.

- j. PENANGANAN TERHADAP MASYARAKAT PENDERITA HIV LEBIH DITINGKATKAN AGAR TIDAK SEMAKIN MENULAR DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa sampai saat ini (bulan Juni 2017) jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang sejumlah 383 penderita. Jumlah tersebut kira-kira 47% dari penderita yang di perkirakan ada di Kabupaten Rembang oleh Kementerian Kesehatan, sehingga langkah yang perlu di ambil adalah :

- a. Menggiatkan atau mengakselerasi penemuan penderita HIV/AIDS untuk kemudian mengobatinya sehingga hal ini akan berdampak mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Rembang.
- b. Saat ini Puskesmas telah di tingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan program HIV/AIDS melalui penetapan Puskesmas sebagai Klinik VCT (Voluntary Consulting Testing) dan PMS (Penyakit Menular Sexual).
- c. RSUD dr. Soetrasno Rembang telah di lengkapi klinik CST (Consulting Supporting Therapy) sehingga mampu memberikan pelayanan pendampingan dan pengobatan penderita penyakit HIV/AIDS.

- d. Upaya peningkatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi penyakit HIV/AIDS serta pencegahan pada masyarakat.
- e. Mengurangi besarnya stigma yang di alami oleh penderita HIV/AIDS (ODHA) sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat secara normal dan tidak ada pengasingan oleh masyarakat.

k. TENTANG POTENSI WISATA AGAR DIKELOLA DENGAN PROFESIONAL DAPAT KAMI SAMPAIKAN :

Bahwa untuk meningkatkan potensi wisata di Kab. Rembang sesuai dengan visi dan misi yang ada, sebagai langkah awal dilaksanakan pemetaan potensi wisata atau obyek wisata di Kab. Rembang, sebagai dasar pengelolaan obyek wisata daerah.

l. DAN TENTANG JANJI BUPATI TERKAIT DENGAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMKAB REMBANG YANG TIDAK BEKERJA DENGAN BAIK AKAN DIKENAKAN SANKSI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM TEREALISASI DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

A. Pasal 3, Angka 12 :

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

B. Pasal 9, Angka 12 :

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban "mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)".

C. Pasal 10, Angka 10 :

Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban "mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang 25% (dua puluh lima persen)".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

D. Pasal 1, Angka 4 :

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.

Terkait dengan janji akan dikenakannya sanksi bagi Pejabat yang tidak mau bekerja dengan baik, Pemerintah Kabupaten Rembang tetap akan melakukan prosesnya sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga didapatkan keputusan yang tepat sasaran dan tepat tingkatan dan jenis hukuman disiplin yang akan ditetapkan.

3. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

a. TENTANG POTONGAN RP.100.000/BULAN BAGI ASN UNTUK ANAK YATIM DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Pemkab Rembang tidak melakukan penarikan bagi ASN setiap bulannya, hanya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Rembang, maka ASN dihimbau untuk berempati kepada anak yatim.

b. DAN TENTANG MENGANTISIPASI KELEMAHAN DESA DALAM MENYUSUN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT

Bahwa upaya-upaya mengantisipasi kelemahan Desa sudah kami lakukan dengan mengadakan Bimbingan-bimbingan teknis seperti administrasi desa, pengelolaan keuangan Desa, pertanggungjawaban keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pelatihan-pelatihan bagi Aparatur Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Rembang dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dana transfer yang ke Desa-Desa sebagai tindaklanjut kegiatan tersebut, Bagian tata pemerintahan membuka konsultasi bagi Desa maupun Kecamatan setiap hari (*sekaligus menjawab dari fraksi Partai Karya Sejahtera*)

c. PRIORITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN JALAN ANTAR KECAMATAN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Untuk Tahun Anggaran 2017 Pemeliharaan Rutin Jalan sudah mencapai 85% dan diantaranya merupakan Pemeliharaan/Perbaikan Jalan antar kecamatan.

- d. PEMUTAKHIRAN DATA TERHADAP SELURUH DPA DISETIAP OPD DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Pemkab telah melaksanakan verifikasi terhadap DPA seluruh OPD dan dituangkan dalam APBD Induk dan Perubahan APBD.

- e. REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN PENGAWASAN INTERNAL DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Inspektorat telah meningkatkan mutu kapabilitas APIP dari level I ke level II, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa pada tahun 2019 semua APIP harus berada di level III. Ketika Inspektorat Kabupaten Rembang telah mencapai level II maka inspektorat sudah berdaya guna baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana sehingga akan menjadikan inspektorat sebagai suatu lembaga pengawas Pemerintah seperti apa yang diharapkan.

- f. TENTANG STANDAR KUALITAS BANGUNAN DALAM *MEMORANDUM of UNDERSTANDING* DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

Sesuai dengan PP Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pasal 35 ayat 1 "Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi"

Di dalam SSUK lampiran surat perjanjian antara PPK dengan Penyedia sudah menyebutkan umur konstruksi : 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.

- g. TENTANG *REWARD AND PUNISHMENT* TERHADAP SERAPAN OPD DALAM APBD REMBANG

Pemkab Rembang telah melakukan langkah-langkah yang optimal dalam mengevaluasi dan pengawasan melalui pembentukan Tim Penyerapan Anggaran, Rapat seninan; dan TP4D.

4. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - NASIONAL DEMOKRAT

- a. DIREKTUR RBSJ YANG BARU UNTUK SEGERA MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF, BISA MEMBAWA PERUSAHAAN DAERAH LEBIH BERKEMBANG DAN MAJU DAPAT KAMI SAMPAIKAN :

Bahwa kami juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk dari DPRD Kabupaten Rembang agar harapan besar kita terhadap

manajemen baru PT RBSJ dapat mengelola usaha-usaha yang potensial sehingga dapat membawa perusahaan daerah ini menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD).

- b. TENTANG ADANYA KELUHAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS AIR PDAM, PEMKAB REMBANG SUPAYA SEGERA ADA PERBAIKAN JARINGAN AGAR KUALITAS AIR PDAM BISA LEBIH BAIK DAPAT KAMI SAMPAIKAN :

Bahwa keluhan air keruh, di antaranya di wilayah Kaliori disebabkan karena kualitas air baku dari embung banyukuwung mengalami penurunan mutu yang disebabkan tingginya zat organik yang terkandung di dalam air embung yang disebabkan karena pencemaran air embung oleh pupuk urea yang digunakan petani di area embung.

Upaya yang dilakukan PDAM yaitu :

1. meningkatkan mutu pengolahan air dengan cara menambah volume bahan kimia baik PAC maupun kaporit.
 2. membuat kran pengurasan semaksimal mungkin untuk membuang endapan lumpur yang terbawa ke dalam pipa, dan
 3. ke depan meningkatkan kapasitas IPA Gunungsari dan secara umum perlu dilakukan peremajaan jaringan pipa mengingat banyak jaringan pipa PDAM yang sudah saatnya untuk diganti.
- c. SEHUBUNGAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN KELENGKAPANNYA SERTA BIDANG-BIDANG LAIN DI DPU, KARENA PENYERAPAN ANGGARAN DI TAHUN 2017 MASIH MINIM DAPAT KAMI SAMPAIKAN:

Bahwa Kita berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dengan memperhatikan langkah-langkah yang tepat pada time scedule untuk penyerapan anggaran.

Kami dari bidang SDA sudah semaksimal mungkin melakukan penyerapan anggaran di awal-awal tahun,karena terkait perencanaan kegiatan 2017 dilaksanakan ditahun yang sama,maka sedikit banyak mempengaruhi proses pengadaan barang jasa,karena menunggu survey dilapangan selesai,dan pengecekan dokumen gbr,Rab harus benar2 sesuai dilapangan.di triwulan ke 3 smua pekerjaan sudah ber SPK dan terjadi penyerapan yg maksimal.

- d. SELANJUTNYA TENTANG KEAKTIFAN JAJARAN OPD DALAM MENDUKUNG UPAYA DPRD UNTUK MELAKUKAN FUNGSI KONTROL TERHADAP KINERJA EKSEKUTIF DAN PEMBAHASAN APBD, KARENA JAJARAN OPD SERING TIDAK MAU MEMENUHI SURAT UNDANGAN DARI KOMISI,

Akan kami peringatkan supaya memperhatikan ketentuan tugas pokok dan fungsi dan senantiasa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

- e. DAN ADANYA KASUS PENGANIAYAAN SEORANG KEPALA SEKOLAH TERHADAP SEORANG GURU DAPAT KAMI SAMPAIKAN :

Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk dilakukan klarifikasi dan diberikan pembinaan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah, materi tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial akan lebih ditekankan kembali.

- f. KEMUDIAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI MASYARAKAT, PEMKAB REMBANG SUPAYA MEMBERI PENGARAHAN DI SETIAP DESA UNTUK MEMASANG PAPAN INFORMASI YANG BERISI TENTANG ANGGARAN DESANYA DAN UNTUK APA ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN:

Akan kami perhatikan.

5. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

- a. TENTANG MENENTUKAN PROYEKSI PAD DAPAT KAMI SAMPAIKAN:

Pertama kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh fraksi Gerindra, dan kedepan kami akan terus berupaya melakukan upaya peningkatan PAD dan menentukan proyeksi secara lebih cermat.

- b. BAHWA REALISASI CAPAIAN KINERJA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM HANYA 86,68 PERSEN, SEHINGGA BERDAMPAK KURANG MAKSIMALNYA PEMBANGUNAN DI KAB. REMBANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN

Bahwa akan kami maksimal kinerja dan penyerapan diantaranya dengan sudah dilaksanakan tandatangan kontrak sebanyak 7 (tujuh) paket pekerjaan.

c. TENTANG KINERJA DARI BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DPU DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

Terimakasih atas penilaiannya terkait kegiatan pengairan. Untuk Memajukan Pengairan Irigasi Pertanian, di Tahun Anggaran 2017 terdapat Kegiatan DAU Jumlah 28 Paket pekerjaan, dan DAK berjumlah 17 Paket Kegiatan untuk Daerah Irigasi Yang Rusak dan BANPROP 2017 ada 4 Kegiatan Pembangunan Embung dan Rehab. Daerah Irigasi. Selanjutnya DPU SDA akan terus melakukan pendataan dilapangan terkait Bendungan, Saluran Irigasi, dan Embung yang sekiranya memerlukan perbaikan guna menunjang Irigasi pertanian.

d. TENTANG BESARNYA SILPA DIANGKA 214,8 MILYAR YANG MASIH TERLALU TINGGI KAMI HARAPKAN BISA DIPERKECIL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG.

Bahwa pada Program/kegiatan TA. 2017 akan kita laksanakan semaksimal mungkin sehingga SiLPA di akhir tahun 2017 kecil.

e. DAN TENTANG TIDAK ADANYA KEGIATAN YANG BERUPA PEMBERIAN BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT KECIL LAINNYA YANG SECARA RIIL DI MASYARAKAT.

Akan kami perhatikan, dengan tetap mengacu atas ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

f. SELANJUTNYA TERKAIT OPD KELAUTAN DAN PERIKANAN KURANG ADANYA BREAKDOWN ANGGARAN APBD YANG KUAT DAN SEIMBANG TERHADAP KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI APBN MISALNYA PELATIHAN KEPADA PETANI GARAM SEHINGGA PROGRAM TERSEBUT MENJADI KURANG MAKSIMAL.

Sebetulnya Pemkab telah melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap pelatihan-pelatihan maupun pendampingan kepada petani garam dalam rangka meningkatkan penghasilan petani.

g. TENTANG PENATAAN DAYA TARIK WISATA DI LINGKUNGAN OBYEK WISATA PANTAI BINANGUN KEC. LASEM YANG DALAM TEMUAN BPK ADANYA KELEBIHAN BAYAR SEBESAR 110,4 JUTA AGAR SEGERA DISELESAIKAN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa terkait penyelesaian temuan BPK, yang dimaksud dengan sejumlah nilai sebesar Rp.110.410.080,00 tersebut merupakan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan. Dan kami akan segera melaksanakan proses pencairan jaminan pelaksanaan tersebut.

6. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA

- a. BAHWA TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH) 2016 SANGAT MINIMAL DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

Sesuai dengan pemendagri 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD 2016 pada romawi III, angka 1, disebutkan bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- a. Pajak daerah TA 2015 terealisasi sebesar Rp42.306.285.806, pada PAD TA 2016 Target justru diturunkan menjadi Rp41.678.500.000. Penetapan target APBD pada Pajak Daerah TA 2016 sudah berdasar pada potensi yang ada, namun demikian ada beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang tidak dapat diprediksi potensi dan realisasinya sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan target pendapat di tahun berikutnya. Target pajak daerah TA 2016 telah mengalami kenaikan dibandingkan TA 2015 dari nilai sebesar Rp.37.023.000.000,00 menjadi Rp. 41.678.500.000 terealisasi Rp.48.418.459.850,00
- b. Retribusi Daerah TA 2015 terealisasi Rp32.227.998.903, pada target Retribusi TA 2016 diturunkan menjadi Rp20.893.370.500. Perlu kami sampaikan bahwa penurunan Retribusi pada tahun 2016 dikarenakan adanya peralihan status puskesmas menjadi BLUD, sehingga posting pendapatan yang semula masuk hasil retribusi daerah sesuai Permendagri No 52 Tahun 2015 posting tersebut dialihkan ke lain -lain PAD yang sah.
- b. REALISASI BELANJA SEBESAR RP 1.734.304.081.928,58 APAKAH SUDAH BERDAMPAK PADA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:
- Bahwa Alokasi belanja sebesar Rp 1.734.304.081.928,58 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana prosentasenya masih lebih tinggi Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung . Namun demikian belanja yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan tersebut jelas memberikan dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Rembang, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilihat dari data kemiskinan yang makin menurun dari 19,28 % turun menjadi 18 % pada tahun 2016, sedangkan pertumbuhan

ekonomi tumbuh sebesar 5,49 % yang berada diatas capaian rata-rata propinsi dan nasional. Demikian juga dalam hal *genie ratio*, menunjukkan sebesar 0,3 yang artinya menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif rendah.

7. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN

TENTANG PERLU DIPERHATIKAN CAPAIAN ATAU *OUTCOME* PADA PELAKSANAAN ANGGARAN DI MASING-MASING KEGIATAN DAN TINGKAT CAPAIAN, PENYERAPAN ANGGARAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN :

Terima kasih atas perhatian dan masukannya, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam upaya melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama rentang periode satu tahun anggaran, kami telah memiliki komitmen yang kuat, dengan didukung oleh semangat kerja di masing OPD sesuai tugas dan pokok masing - masing OPD. Kami berharap dukungan semua pihak, agar target kinerja dan outcome di masing - masing program kegiatan dapat secara maksimal dan optimal tercapai, terlebih secara berkala telah dilakukan kegiatan pemantauan percepatan penyerapan anggaran dan evaluasi secara berkala pula atas capaian kegiatan di masing - masing OPD.

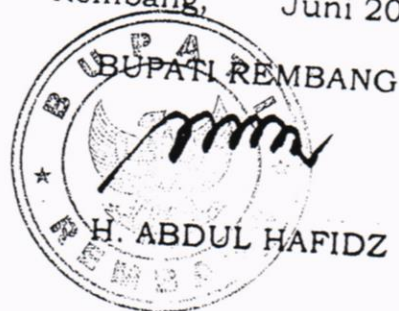
Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, Juni 2017





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (IV/ III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 3 RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD;
4. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
5. Pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD (3 Raperda);

6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Persetujuan atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
7. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda Non APBD (3 Raperda);
9. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Senin tanggal 17 Juli 2017 kita dapat hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna Keempat (IV) DPRD membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 telah berpulang ke rahmatullah Bapak Mulyadi Bin Umar ayahanda Bapak Puji Santoso, S.P., M.H. Kami segenap pimpinan dan anggota ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Mulyadi Bin Umar, semoga almarhum Khusnul Khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Keempat (IV) ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum pada Rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama (I), Kedua (II), maupun Ketiga (III) dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, yakni dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil penjadwalan ulang Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini dilaksanakan juga Rapat Paripurna Ketiga membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Dengan demikian terdapat dua agenda dalam rapat paripurna ini yaitu membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan Raperda Non APBD meliputi :

- Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dinamika-dinamika dalam pembahasan sampai adanya perubahan terhadap judul menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

4. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
5. Pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Persetujuan atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
7. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda Non APBD (3 Raperda);
9. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu kepada Saudara Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

=== PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ===

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terimakasih Saudara . Drs. Achmad Mualif atas laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah laporan Pansus I atas pembahasan 3 Raperda.

Kepada Ketua Pansus I atau yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan, dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS I ATAS 3 RAPERDA =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah laporan Pansus I atas pembahasan 3 Raperda terlampir)*

Terimakasih Saudara Mokhammad Anshori atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara keempat yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Namun sebelumnya, saya minta kepada yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Mokhammad Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Hj. Hikmah Purnamawati
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muh. Asnawi, S.Pd.I.
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Ayu Ardiyah Mayasari
6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan : Paramita Prapanca ANR, S.Pd.

Secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ *(Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara kelima yaitu pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah pendapat atas 3 Raperda. Kepada yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Edi Kartono, S.Pd., M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Ayu Ardiyah Mayasari
6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FH
1	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara	S	S	S	S	S	S	S
2	Perubahan Kedua atas Peraturan	S	S	S	S	S	S	S

	Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah							
3	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang	S	S	S	S	S	S	S

KETERANGAN :

S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari hasil Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, maupun Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 3 Raperda Non APBD, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda dapat diterima dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Namun untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD terlebih dahulu.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya,

1. Apakah Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

2. Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

3. Apakah Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilaporkan **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketujuh yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, kepada Saudara Sekretaris DPRD dimohon memandu jalannya prosesi penandatanganan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA =====**

➤ *(Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD
Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA NON APBD ===**

➤ *Assalaamu'alaikumWr. Wb*

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

- Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Bapak Sekda Kabupaten Rembang
- Kawan – kawan dari Eksekutif
- Para kawan – kawan dari LSM dan Wartawan

Pada siang ini kita patut bersyukur karena bisa hadir di rapat paripurna dalam acara persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan persetujuan atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD.

Oleh karena itu dari beberapa Fraksi yang ada telah menyampaikan pendapatnya, saya juga sependapat dengan dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi dengan catatan- catatan serta rekomendasinya. Yang kedua rekomendasi dan catatan – catatan sekaligus masukan dan kritikan ini bagi kami itu merupakan amunisi yang baru yang akan menggugah kami untuk bekerja lebih giat. Kami tidak pernah sedikitpun alergi dengan kritikan dan saran – saran karena itu merupakan kekuatan bagi kami untuk membangun bersama – sama di Kabupaten Rembang ini, hanya yang perlu kami sampaikan tadi semua banyak yang menyoroti banyaknya Silpa, yang kedua tentang penyerapan pada tahun 2017 yang masih minim. Perlu kami sampaikan bahwa silpa sejumlah 214 milyar itu yang 130 milyar itu terdiri dari penghematan belanja karena ada tunjangan profesi guru yang transfernya kelebihan sehingga kita masukan ke kasda sejumlah 78 milyar. Dan itu tidak akan masalah karena akan kita perhitungkan dalam belanja pada tahun 2017 ini. Yang kedua banyaknya DAK – DAK mulai tahun 2010 pada Dinas Pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan sejumlah kurang lebih 78 milyar ini juga bagian dari silpa yang harus kita hitung dalam LKPJ, oleh karena itu sudah saya sampaikan

bahwa kalau yang normal baik belanja langsung dan tidak langsung penyerapannya 92, sekian persen dan ini melampaui belanja nasional dan belanja provinsi, ini saya tidak minta dipuji atau gimana tapi ini faktanya memang seperti itu meskipun di infrastruktur kita baru menjalankan baru 82 persen, karena ada berbagai alasan yang pertama adalah masih ada persoalan ini masih belum hilang sehingga dari kawan – kawan masih kurang yakin bahwa disana tidak ada masalah yang sebenarnya, yang kedua tahun 2017 ini kenapa penyerapan tidak bisa maksimal seperti tahun yang dulu karena sejak januari oleh Peraturan Pemerintah semua daerah harus menjalankan OPD baru. Di Rembang ini saja 636 jabatan yang baru meskipun ada yang semacam dikukuhkan tetapi sekitar 600 lebih itu jabatan baru, mulai dari dari pejabat dari Kabid sampai Kasi, Kabag sampai kasubag ini semua menyesuaikan dulu, Alhamdulillah mulai juli ini sudah mulai gerak dan dengan sisa sekitar 4 bulan ini kita bisa menyelesaikan program yang kita tetapkan bersama oleh DPRD dan Eksekutif. Saya kira jawabannya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pendapat akhir daari semua fraksi menyetujui baik Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan 3 Raperda Non APBD. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

- *(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.


Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Bupati, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang dijadwalkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Pansus I DPRD atas pelaksanaan tugas dalam membahas 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.

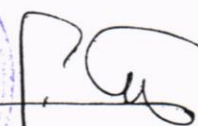
Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor ...15... Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN V : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 900/...12.../ 2017 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah.

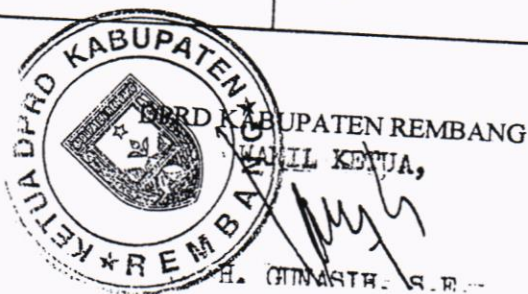
**RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

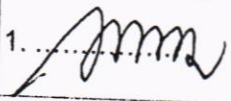
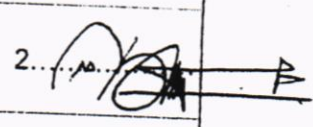
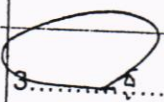
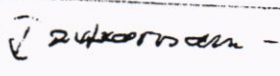
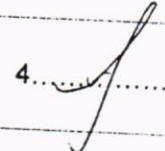
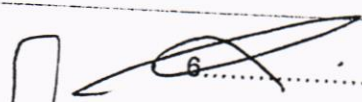
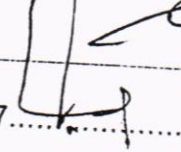

1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

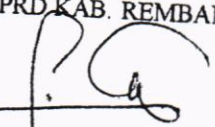


DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB

NÖ	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Polintarno, SH	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang/.....	5.
6	K. Bud. Awan	Ka. Kepolisian Resort Rembang/.....	6. 
7	Qosim	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD**

HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017




PUKUL : 10.00 WIB

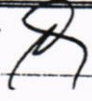
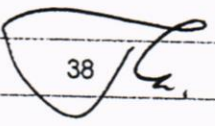
1	2	3	4	5
0	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	STAF AHLI BUPATI	Non effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. JAWANI	AS. II	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Achmad	As. Pemasar	8
9	BAG. HUKUM	Hadi Bdp. Dp	Hukum	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gauchando	Bag. Adm. Pub	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lat'ipudin	Bag. Kelm	13
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Haryat	Bag. Org	15
16	BPPKAD	MKS & M	Kabon	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18
19	DINPERMADES	H. WALUYO	KADIS	19
20	BKD	Suparmin	Ka. R. Kad	20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
22	B P B D	Sumarno	Kabod	22
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN	Surawan		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29
30	DISKOMINFO	Andi Danjoko	Da. Kaban / ket	30
31	DINAS PERHUBUNGAN			31
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINSOSIAL P2 KB	Dwi Wahyuni	ka	33
34	DINBUDPAR			34

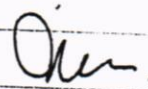

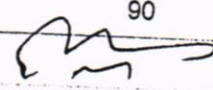



RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA LAPORAN BANGGAR ATAS HASIL PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016

HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017

PUKUL : 11.00 WIB

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
STAF AHLI BUPATI			1
STAF AHLI BUPATI			2
STAF AHLI BUPATI			3
STAF AHLI BUPATI			4
ASISTEN I SEKDA			5
ASISTEN II SEKDA			6
ASISTEN III SEKDA			7
BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
BAG. HUKUM			9
BAG. HUMAS	Sulistiyowati	Ka. sub. bag	10 
BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
BAG. UMUM			14
BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
BPPKAD	MUS Ben	Kabr	16 
INSPEKTORAT			17
BAPPEDA			18
DINPERMADES			19
B K D			20
DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
B P B D			22
DPU TATA RUANG			23
DINPERKIM			24
DINAS KESEHATAN			25
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
DINAS INDAGKOP & UMKM			27
DINTANPAN			28
DINLUTKAN			29
DISKOMINFO			30
DINAS PERHUBUNGAN	SIGITU	Ka. sub. bag	31 
DINAS DUKCAPIL			32
DINSOSIAL P2 KB			33
DINBUDPAR			34

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR 2	NAMA 3	JABATAN 4	TANDA TANGAN 5
DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Egi Winarno	Ka Div Arpus	37 
RSUD dr. R. SUTRASNO	Joe kimo	Plt Ka Tur.	38 
SATPOL PP			39
TIM PKK KAB. REMBANG			40
P D A M			41
PERCETAKAN DAERAH			42
PD. BANK PASAR			43
BANK JATENG CAB. REMBANG			44
BRI CAB. REMBANG			45
PD BPR BKK LASEM			46
PT. R B S J			47
APOTIK DAERAH			48
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
DIPENDA PROPINSI			50
BPS KAB. REMBANG			51
RUMAH TAHANAN			52
PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
KANTOR POS DAN GIRO			56
TELKOM REMBANG			57
PLN CAB. REMBANG			58
BAWASLU KAB. REMBANG			59
B P N KAB. REMBANG			60
KANTOR PAJAK			61
UP3AD (ASET DAERAH)			62
KANTOR PELABUHAN			63
KETUA KPU KAB. REMBANG			64
SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
BTPN KCP. REMBANG			67
PERUM PEGADAIAN			68
BSM.BANK DANAMON			69
DHARMA WANITA PERSATUAN			70
GERAKAN PRAMUKA			71
PMI CAB. REMBANG			72
STIE. YPPI REMBANG			73

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR 2	NAMA 3	JABATAN 4	TANDA TANGAN 5
DPD PAN			77
DPC PARTAI HANURA			78
DPC PKS			79
DPC PARTAI NASDEM			80
DPC PARTAI GERINDRA			81
DPC PKB			82
DPC PDI PERJUANGAN			83
SUARA MERDEKA	Mulyanto	Wartawan	84 
CAKRA TV			85
RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
RADIO R2B			87
MAJALAH BANGKIT			88
PATI EKSPRESS			89
RADIO MATA AIR			90
MIMBAR RAKYAT	A. Mulyanto		91 
CARAKA CANDI			92
KEDAULATAN RAKYAT			93
Harahul BPP BPP BPP BPP	Agus W		94 
at MPK	Ihwan	Stat	95 
	Daryanto. SH		96 
			97
			98
			99
			100
			101
			102
			103
			104
			105
			106
			107
			108
			109
			110
			111
			112
			113
			114

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
19				119
20				120
21				121
22				122
23				123
24				124



Drs ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Sula	1
2	CAMAT KALIORI	M. Rokhim	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	U. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Harjito	9
10	CAMAT PANCUR	Juharto	10
11	CAMAT SEDAN	Subhan	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	Wahadi	13
14	CAMAT SARANG		14



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



TENTANG

**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2016



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telpn (0295) 691194
Email : setdprd@rembangkab.go.id

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 045/1223/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pengiriman Raperda;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 12 Juni 2017 dan 10 Juli 2017 yang mengagendakan Penjadwalan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2017 Jam 11.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2017 Jam 12.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
Hari : Rabu – Jum'at
Tanggal : 5 sampai dengan 7 Juli 2017
Jam : 11.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juli 2017
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi kepada Banggar atas pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

e. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2017
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. HASIL PEMBAHASAN

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2016

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1.490.592.742.455,00	1.564.868.839.955,55	1.564.868.839.955,55	74.276.097.500,55	104,98
1.1	Pendapatan Asli Daerah	217.796.928.144,00	234.168.365.750,55	234.168.365.750,55	16.371.437.606,55	107,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.678.500.000,00	48.420.954.850,00	48.420.954.850,00	6.742.454.850,00	116,18
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.893.370.500,00	23.985.514.302,50	23.985.514.302,50	3.092.143.802,50	114,80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.564.456.000,00	6.564.459.237,00	6.564.459.237,00	3.237,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.660.601.644,00	155.197.437.361,05	155.197.437.361,05	6.536.835.717,05	104,40
1.2	Dana Perimbangan	865.902.960.578,00	935.943.695.312,00	935.943.695.312,00	70.040.734.734,00	108,09
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.257.259.000,00	43.004.058.312,00	43.004.058.312,00	8.746.799.312,00	125,53
1.2.2	Dana Alokasi Umum	671.800.490.578,00	785.380.985.000,00	785.380.985.000,00	113.580.494.422,00	116,91
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	144.904.641.000,00	92.419.410.000,00	92.419.410.000,00	(52.485.231.000,00)	63,78
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	14.940.570.000,00	15.139.242.000,00	15.139.242.000,00	198.672.000,00	101,33
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406.892.853.733,00	394.756.778.893,00	394.756.778.893,00	(12.136.074.840,00)	97,02
1.3.1	Hibah	1.566.904.000,00	1.488.856.904,00	1.488.856.904,00	(78.047.096,00)	95,02
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	91.058.576.183,00	81.133.459.989,00	81.133.459.989,00	(9.925.116.194,00)	89,10
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286.903.900.550,00	286.903.900.000,00	286.903.900.000,00	(550,00)	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.363.473.000,00	25.230.562.000,00	25.230.562.000,00	(2.132.911.000,00)	92,21
2	BELANJA DAERAH	1.874.875.616.260,00	1.734.304.081.928,58	1.734.304.081.928,58	(140.571.534.331,42)	92,50
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.041.333.948.337,00	1.026.233.523.179,00	1.026.233.523.179,00	(15.100.425.158,00)	98,55
2.1.1	Belanja Pegawai	705.573.121.837,00	695.202.128.818,00	695.202.128.818,00	(10.370.993.019,00)	98,53
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00	1.605.011,00	1.605.011,00	(35.394.989,00)	4,34
2.1.4	Belanja Hibah	29.947.605.500,00	27.269.005.350,00	27.269.005.350,00	(2.678.600.150,00)	91,06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.700.000.000,00	7.446.000.000,00	7.446.000.000,00	(254.000.000,00)	96,70
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.455.961.000,00	6.455.961.000,00	6.455.961.000,00	-	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	290.850.885.000,00	289.842.093.000,00	289.842.093.000,00	(1.008.792.000,00)	99,65
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	769.375.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	(752.645.000,00)	2,17
2.2	Belanja Langsung	833.541.667.923,00	708.070.558.749,58	708.070.558.749,58	(125.471.109.173,42)	84,95
2.2.1	Belanja Pegawai	154.367.919.749,00	144.564.120.169,00	144.564.120.169,00	(9.803.799.580,00)	93,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.438.817.221,00	217.960.717.279,58	217.960.717.279,58	(33.478.099.941,42)	86,69
2.2.3	Belanja Modal	427.734.930.953,00	345.545.721.301,00	345.545.721.301,00	(82.189.209.652,00)	80,79
	Jumlah Belanja	1.874.875.616.260,00	1.734.304.081.928,58	1.734.304.081.928,58	(140.571.534.331,42)	92,50
	surplus (devisit)	(384.282.873.805,00)	(169.435.241.973,03)	(169.435.241.973,03)	214.847.631.831,97	44,09
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	396.607.873.805,00	396.607.873.805,61	396.607.873.805,61	0,61	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (S/L DA)	396.607.873.805,00	396.607.873.805,61	396.607.873.805,61	0,61	100,00
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	396.607.873.805,00	396.607.873.805,61	396.607.873.805,61	0,61	100,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.325.000.000,00	12.296.725.422,00	12.296.725.422,00	(28.274.578,00)	99,77
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	12.270.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000,00	26.725.422,00	26.725.422,00	(28.274.578,00)	48,59
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.325.000.000,00	12.296.725.422,00	12.296.725.422,00	(28.274.578,00)	99,77
	Pembiayaan Netto	384.282.873.805,00	384.311.148.383,61	384.311.148.383,61	28.274.578,61	100,01
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	214.875.906.410,58	214.875.906.410,58	214.875.906.410,58	

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=4+5
1	DINAS PENDIDIKAN		475.181.652.837,00	96.823.335.700,00	572.004.988.537,00
2	DINAS KESEHATAN	42.652.634.184,00	40.185.359.000,00	124.202.961.145,00	164.388.320.145,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	80.000.000.000,00	24.627.248.000,00	102.529.952.352,00	127.157.200.352,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000,00	14.878.425.000,00	205.747.900.048,00	220.626.325.048,00
5	BAPPEDA		3.505.652.000,00	9.515.432.000,00	13.021.084.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.707.637.480,00	5.743.451.000,00	5.300.471.000,00	11.043.922.000,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.782.101.000,00	4.254.490.000,00	7.036.591.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3.007.752.000,00	2.987.641.800,00	5.995.393.800,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		9.115.144.000,00	11.693.421.310,00	20.808.565.310,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.371.793.000,00	7.709.798.000,00	13.081.591.000,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.063.378.000,00	9.335.584.000,00	26.852.017.749,00	36.187.601.749,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.545.620.000,00	5.208.060.000,00	6.753.680.000,00
13	SATPOL PP		3.543.615.000,00	6.749.098.000,00	10.292.713.000,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.179.310.000,00	3.491.904.000,00	5.671.214.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		10.217.563.000,00	-	10.217.563.000,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		801.590.000,00	-	801.590.000,00
17	SETDA	6.696.956.000,00	13.439.930.000,00	40.557.640.000,00	53.997.570.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.880.993.000,00	19.546.790.000,00	23.427.783.000,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.340.448.891.311,00	347.359.372.500,00	16.004.942.532,00	363.364.315.032,00
a	(SKPD)	67.653.077.000,00	11.598.546.000,00	16.004.942.532,00	27.603.488.532,00
b	(PPKD)	1.272.795.814.311,00	335.760.826.500,00	-	335.760.826.500,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.390.197.000,00	6.308.590.000,00	9.698.787.000,00
21	BKD		3.723.486.000,00	7.318.445.000,00	11.041.931.000,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.518.791.000,00	1.422.520.000,00	2.941.311.000,00
23	KECAMATAN REMBANG		5.390.741.000,00	3.528.384.000,00	8.919.125.000,00
24	KECAMATAN KALIORI		2.134.119.000,00	777.204.000,00	2.911.323.000,00
25	KECAMATAN SULANG		1.848.738.000,00	1.385.144.000,00	3.233.882.000,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.774.267.000,00	720.100.000,00	2.494.367.000,00
27	KECAMATAN BULU		1.708.716.000,00	847.560.000,00	2.556.276.000,00
28	KECAMATAN LASEM		2.018.964.000,00	776.104.000,00	2.795.068.000,00
29	KECAMATAN PANCUR		2.169.164.000,00	758.600.000,00	2.927.764.000,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.574.618.000,00	736.600.000,00	2.311.218.000,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.686.489.000,00	796.360.000,00	2.482.849.000,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.717.082.000,00	780.970.000,00	2.498.052.000,00
33	KECAMATAN SALE		1.606.679.000,00	831.925.000,00	2.438.604.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN		2.006.595.000,00	1.309.626.000,00	3.316.221.000,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.834.480.000,00	692.220.000,00	2.526.700.000,00
36	KECAMATAN SARANG		2.153.202.000,00	881.400.000,00	3.034.602.000,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		2.060.726.000,00	2.303.280.000,00	4.364.006.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	121.472.000,00	6.468.443.000,00	49.949.310.472,00	56.417.753.472,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN		8.441.572.000,00	6.166.198.000,00	14.607.770.000,00
40	DINAS ESDM		2.405.945.000,00	14.543.015.000,00	16.948.960.000,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.000.000,00	2.654.327.000,00	14.020.140.000,00	16.674.467.000,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.588.773.500,00	4.344.452.000,00	27.512.116.815,00	31.856.568.815,00
	JUMLAH	1.490.592.742.455,00	1.041.333.948.337,00	833.541.667.923,00	1.874.875.616.260,00

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	REALISASI		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=8+9
1	DINAS PENDIDIKAN		471.179.881.270,00	54.999.137.691,00	526.179.018.961,00
2	DINAS KESEHATAN	39.074.936.247,60	39.985.780.250,00	106.854.735.001,00	146.840.515.251,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	80.819.323.453,45	24.562.486.013,00	92.231.449.262,58	116.793.935.275,58
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.328.692.750,00	14.672.078.930,00	176.568.670.416,00	191.240.749.346,00
5	BAPPEDA		3.360.997.861,00	9.207.296.925,00	12.568.294.786,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.915.667.000,00	5.622.312.601,00	5.029.182.190,00	10.651.494.791,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.668.757.801,00	4.127.639.525,00	6.796.397.326,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.940.912.781,00	2.789.810.276,00	5.730.723.057,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.886.068.840,00	11.232.830.993,00	20.118.899.833,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.228.744.841,00	6.758.456.900,00	11.987.201.741,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.917.511.495,00	9.259.563.288,00	25.155.913.889,00	34.415.477.177,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.471.755.753,00	5.120.187.717,00	6.591.943.470,00
13	SATPOL PP		3.437.722.814,00	6.578.442.375,00	10.016.165.189,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.097.770.373,00	3.018.430.995,00	5.116.201.368,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		10.018.486.066,00	-	10.018.486.066,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		706.934.844,00	-	706.934.844,00
17	SETDA	6.780.177.417,00	13.017.977.259,00	38.226.536.198,00	51.244.513.457,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.785.974.662,00	16.081.218.074,00	19.867.192.736,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.414.496.991.651,00	341.101.602.308,00	14.074.972.115,00	355.176.574.423,00
a	(SKPD)	83.796.517.446,00	10.070.207.947,00	14.074.972.115,00	24.145.180.062,00
b	(PPKD)	1.330.700.474.205,00	331.031.394.361,00	-	331.031.394.361,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.211.270.907,00	5.975.225.939,00	9.186.496.846,00
21	BKD		3.613.075.559,00	6.721.040.891,00	10.334.116.450,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.454.772.932,00	1.371.165.239,00	2.825.938.171,00
23	KECAMATAN REMBANG		5.180.107.696,00	3.439.974.050,00	8.620.081.746,00
24	KECAMATAN KALIORI		2.041.431.386,00	757.600.818,00	2.799.032.204,00
25	KECAMATAN SULANG		1.777.539.646,00	1.267.463.000,00	3.045.002.646,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.694.047.445,00	657.997.641,00	2.352.045.086,00
27	KECAMATAN BULU		1.634.779.127,00	821.579.480,00	2.456.358.607,00
28	KECAMATAN LASEM		1.920.614.184,00	768.258.141,00	2.688.872.325,00
29	KECAMATAN PANCUR		2.094.039.809,00	752.701.072,00	2.846.740.881,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.496.752.406,00	709.014.052,00	2.205.766.458,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.604.101.869,00	791.644.000,00	2.395.745.869,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.640.341.266,00	760.457.150,00	2.400.798.416,00
33	KECAMATAN SALE		1.546.601.306,00	829.613.000,00	2.376.214.306,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.942.028.267,00	1.280.108.000,00	3.222.136.267,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.718.215.397,00	639.310.000,00	2.357.525.397,00
36	KECAMATAN SARANG		2.079.970.058,00	863.955.871,00	2.943.925.929,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.972.293.984,00	2.263.957.707,00	4.236.251.691,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	122.427.000,00	6.272.760.423,00	43.917.561.811,00	50.190.322.234,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN		8.336.331.555,00	5.980.174.213,00	14.316.505.768,00
40	DINAS ESDM		2.246.227.931,00	11.337.031.370,00	13.583.259.301,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.055.343.250,00	2.514.388.602,00	12.277.428.745,00	14.791.817.347,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.357.769.691,50	4.236.022.869,00	25.832.386.017,00	30.068.408.886,00
	JUMLAH	1.564.868.839.955,55	1.026.233.523.179,00	708.070.558.749,58	1.734.304.081.928,58

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(4.001.771.567,00)	(41.824.198.009,00)	(45.825.969.576,00)
2	DINAS KESEHATAN	(3.577.697.936,40)	(199.578.750,00)	(17.348.226.144,00)	(17.547.804.894,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	819.323.453,45	(64.761.987,00)	(10.298.503.089,42)	(10.363.265.076,42)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	73.692.750,00	(206.346.070,00)	(29.179.229.632,00)	(29.385.575.702,00)
5	BAPPEDA	-	(144.654.139,00)	(308.135.075,00)	(452.789.214,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	208.029.540,00	(121.138.399,00)	(271.288.810,00)	(392.427.209,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	(113.343.199,00)	(126.850.475,00)	(240.193.674,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(66.839.219,00)	(197.831.524,00)	(264.670.743,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(229.075.160,00)	(460.590.317,00)	(689.665.477,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(143.048.159,00)	(951.341.100,00)	(1.094.389.259,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UMKM	854.133.495,00	(76.020.712,00)	(1.696.103.860,00)	(1.772.124.572,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(73.864.247,00)	(87.872.283,00)	(161.736.530,00)
13	SATPOL PP	-	(105.892.186,00)	(170.655.625,00)	(276.547.811,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(81.539.627,00)	(473.473.005,00)	(555.012.632,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(199.076.934,00)	-	(199.076.934,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(94.655.156,00)	-	(94.655.156,00)
17	SETDA	83.221.417,00	(421.952.741,00)	(2.331.103.802,00)	(2.753.056.543,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(95.018.338,00)	(3.465.571.926,00)	(3.560.590.264,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	74.048.100.340,00	(6.257.770.192,00)	(1.929.970.417,00)	(8.187.740.609,00)
a	(SKPD)	16.143.440.446,00	(1.528.338.053,00)	(1.929.970.417,00)	(3.458.308.470,00)
b	(PPKD)	57.904.659.894,00	(4.729.432.139,00)	-	(4.729.432.139,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(178.926.093,00)	(333.364.061,00)	(512.290.154,00)
21	BKD	-	(110.410.441,00)	(597.404.109,00)	(707.814.550,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(64.018.068,00)	(51.354.761,00)	(115.372.829,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(210.633.304,00)	(88.409.950,00)	(299.043.254,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(92.687.614,00)	(19.603.182,00)	(112.290.796,00)
25	KECAMATAN SULANG	-	(71.198.354,00)	(117.681.000,00)	(188.879.354,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(80.219.555,00)	(62.102.359,00)	(142.321.914,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(73.936.873,00)	(25.980.520,00)	(99.917.393,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(98.349.816,00)	(7.845.859,00)	(106.195.675,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(75.124.191,00)	(5.898.928,00)	(81.023.119,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(77.865.594,00)	(27.585.948,00)	(105.451.542,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(82.387.131,00)	(4.716.000,00)	(87.103.131,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(76.740.734,00)	(20.512.850,00)	(97.253.584,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(60.077.694,00)	(2.312.000,00)	(62.389.694,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(64.566.733,00)	(29.518.000,00)	(94.084.733,00)
35	KECAMATAN SEDAN	-	(73.231.942,00)	(17.444.129,00)	(90.676.071,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(88.432.016,00)	(39.322.293,00)	(127.754.309,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(195.682.577,00)	(6.031.748.661,00)	(6.227.431.238,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	955.000,00	(105.240.445,00)	(186.023.787,00)	(291.264.232,00)
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	-	(159.717.069,00)	(3.205.983.630,00)	(3.365.700.699,00)
40	DINAS ESDM	-	(139.938.398,00)	(1.742.711.255,00)	(1.882.649.653,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(2.656.750,00)	(108.429.131,00)	(1.679.730.798,00)	(1.788.159.929,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.768.996.191,50	(108.429.131,00)	(1.679.730.798,00)	(1.788.159.929,00)
	JUMLAH	74.276.097.500,55	(15.100.425.158,00)	(125.471.109.173,42)	(140.571.534.331,42)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	%		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	15	16	17	18
1	DINAS PENDIDIKAN		99,16	56,80	91,99
2	DINAS KESEHATAN	91,61	99,50	86,03	89,33
3	RSUD dr R. SOETRASNO	101,02	99,74	89,96	91,85
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	103,27	98,61	85,82	86,68
5	BAPPEDA		95,87	96,76	96,52
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	112,18	97,89	94,88	96,45
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			97,02	96,59
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97,78	93,38	95,59
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		97,49	96,06	96,69
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		97,34	87,66	91,63
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UMKM	127,88	99,19	93,68	95,10
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95,22	98,31	97,61
13	SATPOL PP		97,01	97,47	97,31
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		96,26	86,44	90,21
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				98,05
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		88,19		88,19
17	SETDA	101,24	96,86	94,25	94,90
18	SEKRETARIAT DPRD		97,55	82,27	84,80
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	105,52	98,20	87,94	97,75
a	(SKPD)	123,86	86,82	87,94	87,47
b	(PPKD)	104,55	98,59		98,59
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		94,72	94,72	94,72
21	BKD		97,03	91,84	93,59
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU			96,39	96,08
23	KECAMATAN REMBANG		96,09	97,49	96,65
24	KECAMATAN KALIORI		95,66	97,48	96,14
25	KECAMATAN SULANG		96,15	91,50	94,16
26	KECAMATAN SUMBER		95,48	91,38	94,29
27	KECAMATAN BULU		95,67	96,93	96,09
28	KECAMATAN LASEM		95,13	98,99	96,20
29	KECAMATAN PANCUR		96,54	99,22	97,23
30	KECAMATAN SLUKE		95,05	96,25	95,44
31	KECAMATAN PAMOTAN		95,11	99,41	96,49
32	KECAMATAN GUNEM		95,53	97,37	96,11
33	KECAMATAN SALE		96,26	99,72	97,44
34	KECAMATAN KRAGAN		96,78	97,75	97,16
35	KECAMATAN SEDAN		93,66	92,36	93,30
36	KECAMATAN SARANG		96,60	98,02	97,01
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		95,71	98,29	97,07
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	100,79	96,97	87,92	88,96
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN			96,98	98,01
40	DINAS ESDM		93,36	77,96	80,14
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	99,75	94,73	87,57	88,71
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	114,05	97,50	93,89	94,39
	JUMLAH	104,98	98,55	84,95	92,50

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PENDAPATAN	MENJADI		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	19	20	21	22=20+21
1	DINAS PENDIDIKAN		471.179.881.270,00	54.999.137.691,00	526.179.018.961,00
2	DINAS KESEHATAN	39.074.936.247,60	39.985.780.250,00	106.854.735.001,00	146.840.515.251,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	80.819.323.453,45	24.562.486.013,00	92.231.449.262,58	116.793.935.275,58
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.328.692.750,00	14.672.078.930,00	176.568.670.416,00	191.240.749.346,00
5	BAPPEDA		3.360.997.861,00	9.207.296.925,00	12.568.294.786,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.915.667.000,00	5.622.312.601,00	5.029.182.190,00	10.651.494.791,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.668.757.801,00	4.127.639.525,00	6.796.397.326,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.940.912.781,00	2.789.810.276,00	5.730.723.057,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.886.068.840,00	11.232.830.993,00	20.118.899.833,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.228.744.841,00	6.758.456.900,00	11.987.201.741,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.917.511.495,00	9.259.563.288,00	25.155.913.889,00	34.415.477.177,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.471.755.753,00	5.120.187.717,00	6.591.943.470,00
13	SATPOL PP		3.437.722.814,00	6.578.442.375,00	10.016.165.189,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.097.770.373,00	3.018.430.995,00	5.116.201.368,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		10.018.486.066,00	-	10.018.486.066,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		706.934.844,00	-	706.934.844,00
17	SETDA	6.780.177.417,00	13.017.977.259,00	38.226.536.198,00	51.244.513.457,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.785.974.662,00	16.081.218.074,00	19.867.192.736,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.414.496.991.651,00	341.101.602.308,00	14.074.972.115,00	355.176.574.423,00
a	(SKPD)	83.796.517.446,00	10.070.207.947,00	14.074.972.115,00	24.145.180.062,00
b	(PPKD)	1.330.700.474.205,00	331.031.394.361,00	-	331.031.394.361,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.211.270.907,00	5.975.225.939,00	9.186.496.846,00
21	BKD		3.613.075.559,00	6.721.040.891,00	10.334.116.450,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.454.772.932,00	1.371.165.239,00	2.825.938.171,00
23	KECAMATAN REMBANG		5.180.107.696,00	3.439.974.050,00	8.620.081.746,00
24	KECAMATAN KALIORI		2.041.431.386,00	757.600.818,00	2.799.032.204,00
25	KECAMATAN SULANG		1.777.539.646,00	1.267.463.000,00	3.045.002.646,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.694.047.445,00	657.997.641,00	2.352.045.086,00
27	KECAMATAN BULU		1.634.779.127,00	821.579.480,00	2.456.358.607,00
28	KECAMATAN LASEM		1.920.614.184,00	768.258.141,00	2.688.872.325,00
29	KECAMATAN PANCUR		2.094.039.809,00	752.701.072,00	2.846.740.881,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.496.752.406,00	709.014.052,00	2.205.766.458,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.604.101.869,00	791.644.000,00	2.395.745.869,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.640.341.266,00	760.457.150,00	2.400.798.416,00
33	KECAMATAN KRAGAN		1.546.601.306,00	829.613.000,00	2.376.214.306,00
34	KECAMATAN SALE		1.942.028.267,00	1.280.108.000,00	3.222.136.267,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.718.215.397,00	839.310.000,00	2.557.525.397,00
36	KECAMATAN SARANG		2.079.970.058,00	863.955.871,00	2.943.925.929,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.972.293.984,00	2.263.957.707,00	4.236.251.691,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	122.427.000,00	6.272.760.423,00	43.917.561.811,00	50.190.322.234,00
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN		8.336.331.555,00	5.980.174.213,00	14.316.505.768,00
40	DINAS ESDM		2.246.227.931,00	11.337.031.370,00	13.583.259.301,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.055.343.250,00	2.514.388.602,00	12.277.428.745,00	14.791.817.347,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.357.769.691,50	4.236.022.869,00	25.832.386.017,00	30.068.408.886,00
	JUMLAH	1.564.868.839.955,55	1.026.233.523.179,00	708.070.558.749,58	1.734.304.081.928,58

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(4.001.771.567,00)	(41.824.198.009,00)	(45.825.969.576,00)
2	DINAS KESEHATAN	(3.577.697.936,40)	(199.578.750,00)	(17.348.226.144,00)	(17.547.804.894,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	819.323.453,45	(64.761.987,00)	(10.298.503.089,42)	(10.363.265.076,42)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	73.692.750,00	(206.346.070,00)	(29.179.229.632,00)	(29.385.575.702,00)
5	BAPPEDA	-	(144.654.139,00)	(308.135.075,00)	(452.789.214,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	208.029.540,00	(121.138.399,00)	(271.288.810,00)	(392.427.209,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	(113.343.199,00)	(126.850.475,00)	(240.193.674,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(66.839.219,00)	(197.831.524,00)	(264.670.743,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(229.075.160,00)	(460.590.317,00)	(689.665.477,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(143.048.159,00)	(951.341.100,00)	(1.094.389.259,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	854.133.495,00	(76.020.712,00)	(1.696.103.860,00)	(1.772.124.572,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(73.864.247,00)	(87.872.283,00)	(161.736.530,00)
13	SATPOL PP	-	(105.892.186,00)	(170.655.625,00)	(276.547.811,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(81.539.627,00)	(473.473.005,00)	(555.012.632,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(199.076.934,00)	-	(199.076.934,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(94.655.156,00)	-	(94.655.156,00)
17	SETDA	83.221.417,00	(421.952.741,00)	(2.331.103.802,00)	(2.753.056.543,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(95.018.338,00)	(3.465.571.926,00)	(3.560.590.264,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	74.048.100.340,00	(6.257.770.192,00)	(1.929.970.417,00)	(8.187.740.609,00)
a	(SKPD)	16.143.440.446,00	(1.528.338.053,00)	(1.929.970.417,00)	(3.458.308.470,00)
b	(PPKD)	57.904.659.894,00	(4.729.432.139,00)	-	(4.729.432.139,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(178.926.093,00)	(333.364.061,00)	(512.290.154,00)
21	BKD	-	(110.410.441,00)	(597.404.109,00)	(707.814.550,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(64.018.068,00)	(51.354.761,00)	(115.372.829,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(210.633.304,00)	(88.409.950,00)	(299.043.254,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(92.687.614,00)	(19.603.182,00)	(112.290.796,00)
25	KECAMATAN SULANG	-	(71.198.354,00)	(117.681.000,00)	(188.879.354,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(80.219.555,00)	(62.102.359,00)	(142.321.914,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(73.936.873,00)	(25.980.520,00)	(99.917.393,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(98.349.816,00)	(7.845.859,00)	(106.195.675,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(75.124.191,00)	(5.898.928,00)	(81.023.119,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(77.865.594,00)	(27.585.948,00)	(105.451.542,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(82.387.131,00)	(4.716.000,00)	(87.103.131,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(76.740.734,00)	(20.512.850,00)	(97.253.584,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(60.077.694,00)	(2.312.000,00)	(62.389.694,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(64.566.733,00)	(29.518.000,00)	(94.084.733,00)
35	KECAMATAN SEDAN	-	(116.264.603,00)	(52.910.000,00)	(169.174.603,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(73.231.942,00)	(17.444.129,00)	(90.676.071,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(88.432.016,00)	(39.322.293,00)	(127.754.309,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	955.000,00	(195.682.577,00)	(6.031.748.661,00)	(6.227.431.238,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	-	(105.240.445,00)	(186.023.787,00)	(291.264.232,00)
40	DINAS ESDM	-	(159.717.069,00)	(3.205.983.630,00)	(3.365.700.699,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(2.656.750,00)	(139.938.398,00)	(1.742.711.255,00)	(1.882.649.653,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.768.996.191,50	(108.429.131,00)	(1.679.730.798,00)	(1.788.159.929,00)
	JUMLAH	74.276.097.500,55	(15.100.425.158,00)	(125.471.109.173,42)	(140.571.534.331,42)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PENDAPATAN	%		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	27	28	29	30
1	DINAS PENDIDIKAN		99,16	56,80	91,99
2	DINAS KESEHATAN	91,61	99,50	86,03	89,33
3	RSUD dr R. SOETRASNO	101,02	99,74	89,96	91,85
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	103,27	98,61	85,82	86,68
5	BAPPEDA		95,87	96,76	96,52
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	112,18	97,89	94,88	96,45
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		95,93	97,02	96,59
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97,78	93,38	95,59
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		97,49	96,06	96,69
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		97,34	87,66	91,63
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	127,88	99,19	93,68	95,10
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95,22	98,31	97,61
13	SATPOL PP		97,01	97,47	97,31
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		96,26	86,44	90,21
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		98,05		98,05
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		88,19		88,19
17	SETDA	101,24	96,86	94,25	94,90
18	SEKRETARIAT DPRD		97,55	82,27	84,80
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	105,52	98,20	87,94	97,75
a	(SKPD)	123,86	86,82	87,94	87,47
b	(PPKD)	104,55	98,59		98,59
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		94,72	94,72	94,72
21	BKD		97,03	91,84	93,59
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		95,78	96,39	96,08
23	KECAMATAN REMBANG		96,09	97,49	96,65
24	KECAMATAN KALIORI		95,66	97,48	96,14
25	KECAMATAN SULANG		96,15	91,50	94,16
26	KECAMATAN SUMBER		95,48	91,38	94,29
27	KECAMATAN BULU		95,67	96,93	96,09
28	KECAMATAN LASEM		95,13	98,99	96,20
29	KECAMATAN PANCUR		96,54	99,22	97,23
30	KECAMATAN SLUKE		95,05	96,25	95,44
31	KECAMATAN PAMOTAN		95,11	99,41	96,49
32	KECAMATAN GUNEM		95,53	97,37	96,11
33	KECAMATAN SALE		96,26	99,72	97,44
34	KECAMATAN KRAGAN		96,78	97,75	97,16
35	KECAMATAN SEDAN		93,66	92,36	93,30
36	KECAMATAN SARANG		96,60	98,02	97,01
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		95,71	98,29	97,07
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	100,79	96,97	87,92	88,96
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN		98,75	96,98	98,01
40	DINAS ESDM		93,36	77,96	80,14
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	99,75	94,73	87,57	88,71
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	114,05	97,50	93,89	94,39
	JUMLAH	104,98	98,55	84,95	92,50

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	475.181.652.837	-	-	-	-	-	-	475.181.652.837
2	DINAS KESEHATAN	40.185.359.000	-	-	-	-	-	-	40.185.359.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24.627.248.000	-	-	-	-	-	-	24.627.248.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.878.425.000	-	-	-	-	-	-	14.878.425.000
5	BAPPEDA	3.505.652.000	-	-	-	-	-	-	3.505.652.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.743.451.000	-	-	-	-	-	-	5.743.451.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.782.101.000	-	-	-	-	-	-	2.782.101.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.007.752.000	-	-	-	-	-	-	3.007.752.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.115.144.000	-	-	-	-	-	-	9.115.144.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.371.793.000	-	-	-	-	-	-	5.371.793.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.335.584.000	-	-	-	-	-	-	9.335.584.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.545.620.000	-	-	-	-	-	-	1.545.620.000
13	SATPOL PP	3.543.615.000	-	-	-	-	-	-	3.543.615.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.179.310.000	-	-	-	-	-	-	2.179.310.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.217.563.000	-	-	-	-	-	-	10.217.563.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	801.590.000	-	-	-	-	-	-	801.590.000
17	SETDA	13.439.930.000	-	-	-	-	-	-	13.439.930.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.439.930.000	-	-	-	-	-	-	13.439.930.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	3.880.993.000	-	-	-	-	-	-	3.880.993.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.598.546.000	37.000.000	29.947.605.500	7.700.000.000	6.455.961.000	290.850.885.000	769.375.000	347.359.372.500
a	(SKPD)	11.598.546.000	-	-	-	-	-	-	11.598.546.000
b	(PPKD)	-	37.000.000	29.947.605.500	7.700.000.000	6.455.961.000	290.850.885.000	769.375.000	335.760.826.500
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.390.197.000	-	-	-	-	-	-	3.390.197.000
21	BKD	3.723.486.000	-	-	-	-	-	-	3.723.486.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.518.791.000	-	-	-	-	-	-	1.518.791.000
23	KECAMATAN REMBANG	5.390.741.000	-	-	-	-	-	-	5.390.741.000
24	KECAMATAN KALIORI	2.134.119.000	-	-	-	-	-	-	2.134.119.000
25	KECAMATAN SULANG	1.848.738.000	-	-	-	-	-	-	1.848.738.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.774.267.000	-	-	-	-	-	-	1.774.267.000
27	KECAMATAN BULU	1.708.716.000	-	-	-	-	-	-	1.708.716.000
28	KECAMATAN LASEM	2.018.964.000	-	-	-	-	-	-	2.018.964.000
29	KECAMATAN PANCUR	2.169.164.000	-	-	-	-	-	-	2.169.164.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.574.618.000	-	-	-	-	-	-	1.574.618.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.686.489.000	-	-	-	-	-	-	1.686.489.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.717.082.000	-	-	-	-	-	-	1.717.082.000
33	KECAMATAN SALE	1.606.879.000	-	-	-	-	-	-	1.606.879.000
34	KECAMATAN KRAGAN	2.006.595.000	-	-	-	-	-	-	2.006.595.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.834.480.000	-	-	-	-	-	-	1.834.480.000
36	KECAMATAN SARANG	2.153.202.000	-	-	-	-	-	-	2.153.202.000
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.060.726.000	-	-	-	-	-	-	2.060.726.000
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.468.443.000	-	-	-	-	-	-	6.468.443.000
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.441.572.000	-	-	-	-	-	-	8.441.572.000
40	DINAS ESDM	2.405.945.000	-	-	-	-	-	-	2.405.945.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.654.327.000	-	-	-	-	-	-	2.654.327.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.344.452.000	-	-	-	-	-	-	4.344.452.000
	JUMLAH	705.573.121.837	37.000.000	29.947.605.500	7.700.000.000	6.455.961.000	290.850.885.000	769.375.000	1.041.333.948.337

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	REALISASI							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18=
1	DINAS PENDIDIKAN	471.179.881.270	-	-	-	-	-	-	11+12+13+14+15+16+17
2	DINAS KESEHATAN	39.985.780.250	-	-	-	-	-	-	471.179.881.270
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24.562.486.013	-	-	-	-	-	-	39.985.780.250
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.672.078.930	-	-	-	-	-	-	24.562.486.013
5	BAPPEDA	3.360.997.861	-	-	-	-	-	-	14.672.078.930
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.622.312.601	-	-	-	-	-	-	3.360.997.861
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.668.757.801	-	-	-	-	-	-	5.622.312.601
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.940.912.781	-	-	-	-	-	-	2.668.757.801
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8.886.068.840	-	-	-	-	-	-	2.940.912.781
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.228.744.841	-	-	-	-	-	-	8.886.068.840
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.259.563.288	-	-	-	-	-	-	5.228.744.841
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.471.755.753	-	-	-	-	-	-	9.259.563.288
13	SATPOL PP	3.437.722.814	-	-	-	-	-	-	1.471.755.753
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.097.770.373	-	-	-	-	-	-	3.437.722.814
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.018.486.066	-	-	-	-	-	-	2.097.770.373
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	708.934.844	-	-	-	-	-	-	10.018.486.066
17	SETDA	13.017.977.259	-	-	-	-	-	-	708.934.844
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	13.017.977.259
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.017.977.259	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	13.017.977.259
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	3.785.974.662	-	-	-	-	-	-	3.785.974.662
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.070.207.947	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	341.101.602.308
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	10.070.207.947	-	-	-	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.211.270.907	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	10.070.207.947
21	BKD	3.613.075.559	-	-	-	-	-	-	331.031.394.361
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.454.772.932	-	-	-	-	-	-	3.211.270.907
23	KECAMATAN REMBANG	5.180.107.696	-	-	-	-	-	-	3.613.075.559
24	KECAMATAN KALIORI	2.041.431.386	-	-	-	-	-	-	1.454.772.932
25	KECAMATAN SULANG	1.777.539.646	-	-	-	-	-	-	5.180.107.696
26	KECAMATAN SUMBER	1.894.047.445	-	-	-	-	-	-	2.041.431.386
27	KECAMATAN BULU	1.634.779.127	-	-	-	-	-	-	1.777.539.646
28	KECAMATAN LASEM	1.920.614.184	-	-	-	-	-	-	1.634.779.127
29	KECAMATAN PANCUR	2.094.039.809	-	-	-	-	-	-	1.894.047.445
30	KECAMATAN SLUKE	1.496.752.406	-	-	-	-	-	-	1.920.614.184
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.604.101.869	-	-	-	-	-	-	2.094.039.809
32	KECAMATAN GUNEM	1.640.341.266	-	-	-	-	-	-	1.496.752.406
33	KECAMATAN SALE	1.546.601.306	-	-	-	-	-	-	1.604.101.869
34	KECAMATAN KRAGAN	1.942.028.267	-	-	-	-	-	-	1.640.341.266
35	KECAMATAN SEDAN	1.718.215.397	-	-	-	-	-	-	1.546.601.306
36	KECAMATAN SARANG	2.079.970.058	-	-	-	-	-	-	1.942.028.267
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.972.293.984	-	-	-	-	-	-	1.718.215.397
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.272.760.423	-	-	-	-	-	-	2.079.970.058
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.336.331.555	-	-	-	-	-	-	1.972.293.984
40	DINAS ESDM	2.246.227.931	-	-	-	-	-	-	6.272.760.423
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.514.388.602	-	-	-	-	-	-	8.336.331.555
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.236.022.869	-	-	-	-	-	-	2.246.227.931
	JUMLAH	695.202.128.818	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	1.026.233.523.179

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19=11-3	20=12-4	21=13-5	22=14-6	23=15-7	24=16-8	25=17-9	26=
1	DINAS PENDIDIKAN	(4.001.771.567)	-	-	-	-	-	-	19+20+21+22+23+24+25
2	DINAS KESEHATAN	(199.578.750)	-	-	-	-	-	-	(4.001.771.567)
3	RSUD dr R. BOETRASNO	(64.761.987)	-	-	-	-	-	-	(199.578.750)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(206.346.070)	-	-	-	-	-	-	(64.761.987)
5	BAPPEDA	(144.654.139)	-	-	-	-	-	-	(206.346.070)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(121.138.399)	-	-	-	-	-	-	(144.654.139)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(113.343.199)	-	-	-	-	-	-	(121.138.399)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(66.839.219)	-	-	-	-	-	-	(113.343.199)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(229.075.160)	-	-	-	-	-	-	(66.839.219)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(143.048.159)	-	-	-	-	-	-	(229.075.160)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(76.020.712)	-	-	-	-	-	-	(143.048.159)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(73.864.247)	-	-	-	-	-	-	(76.020.712)
13	SATPOL PP	(105.892.186)	-	-	-	-	-	-	(73.864.247)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(81.539.827)	-	-	-	-	-	-	(105.892.186)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(199.076.934)	-	-	-	-	-	-	(81.539.827)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(94.655.156)	-	-	-	-	-	-	(199.076.934)
17	SETDA	(421.952.741)	-	-	-	-	-	-	(94.655.156)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	(421.952.741)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(421.952.741)	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	(421.952.741)
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(95.018.338)	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.528.338.053)	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(95.018.338)
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	(1.528.338.053)	-	-	-	-	-	-	(1.008.792.000)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(178.926.093)	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(1.528.338.053)
21	BKD	(110.410.441)	-	-	-	-	-	-	(178.926.093)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(64.018.068)	-	-	-	-	-	-	(110.410.441)
23	KECAMATAN REMBANG	(210.833.304)	-	-	-	-	-	-	(64.018.068)
24	KECAMATAN KALIARI	(92.687.614)	-	-	-	-	-	-	(210.833.304)
25	KECAMATAN SULANG	(71.198.354)	-	-	-	-	-	-	(92.687.614)
26	KECAMATAN SUMBER	(80.219.555)	-	-	-	-	-	-	(71.198.354)
27	KECAMATAN BULU	(73.936.873)	-	-	-	-	-	-	(80.219.555)
28	KECAMATAN LASEM	(98.349.816)	-	-	-	-	-	-	(73.936.873)
29	KECAMATAN PANCUR	(75.124.191)	-	-	-	-	-	-	(98.349.816)
30	KECAMATAN SLUKE	(77.865.594)	-	-	-	-	-	-	(75.124.191)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(82.387.131)	-	-	-	-	-	-	(77.865.594)
32	KECAMATAN GUNEM	(76.740.734)	-	-	-	-	-	-	(82.387.131)
33	KECAMATAN SALE	(60.077.694)	-	-	-	-	-	-	(76.740.734)
34	KECAMATAN KRAGAN	(64.566.733)	-	-	-	-	-	-	(60.077.694)
35	KECAMATAN SEDAN	(116.264.603)	-	-	-	-	-	-	(64.566.733)
36	KECAMATAN SARANG	(73.231.942)	-	-	-	-	-	-	(116.264.603)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(88.432.016)	-	-	-	-	-	-	(73.231.942)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(195.682.577)	-	-	-	-	-	-	(88.432.016)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	(105.240.445)	-	-	-	-	-	-	(195.682.577)
40	DINAS ESDM	(159.717.069)	-	-	-	-	-	-	(105.240.445)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(139.938.398)	-	-	-	-	-	-	(159.717.069)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(108.429.131)	-	-	-	-	-	-	(139.938.398)
JUMLAH		(10.370.993.019)	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(108.429.131)
									(15.100.425.158)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	%							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	DINAS PENDIDIKAN	99,16							99,16
2	DINAS KESEHATAN	99,50							99,50
3	RSUD dr R. SOETRASNO	99,74							99,74
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	98,61							98,61
5	BAPPEDA	95,87							95,87
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	97,89							97,89
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	95,93							95,93
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97,78							97,78
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	97,49							97,49
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	97,34							97,34
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	99,19							99,19
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95,22							95,22
13	BATPOL PP	97,01							97,01
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	96,26							96,26
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	98,05							98,05
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	88,19							88,19
17	SETDA	96,86							96,86
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	96,86							96,86
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
18	SEKRETARIAT DPRD	97,55							97,55
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86,82							86,82
a	(SKPD)								
b	(PPKD)	86,82							86,82
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		4,34	91,06	96,70	100,00	99,65	2,17	98,20
21	BKD	94,72							94,72
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	97,03							97,03
23	KECAMATAN REMBANG	95,78							95,78
24	KECAMATAN KALIORI	96,09							96,09
25	KECAMATAN SULANG	95,66							95,66
26	KECAMATAN SUMBER	96,15							96,15
27	KECAMATAN BULU	95,48							95,48
28	KECAMATAN LASEM	95,67							95,67
29	KECAMATAN PANCUR	95,13							95,13
30	KECAMATAN SLUKE	96,54							96,54
31	KECAMATAN PAMOTAN	95,05							95,05
32	KECAMATAN GUNEM	95,11							95,11
33	KECAMATAN SALE	95,53							95,53
34	KECAMATAN KRAGAN	96,26							96,26
35	KECAMATAN SEDAN	96,78							96,78
36	KECAMATAN SARANG	93,66							93,66
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	96,60							96,60
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	95,71							95,71
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	98,97							98,97
40	DINAS ESDM								
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	94,73							94,73
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	93,36							93,36
JUMLAH		97,50	4,34	91,06	96,70	100,00	99,65	2,17	98,55

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGGE

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN								JUMLAH
		MENJADI								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42= 35+36+37+38+39+41	
1	DINAS PENDIDIKAN	471.179.881.270	-	-	-	-	-	-	471.179.881.270	
2	DINAS KESEHATAN	39.985.780.250	-	-	-	-	-	-	39.985.780.250	
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24.562.488.013	-	-	-	-	-	-	24.562.488.013	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.672.078.930	-	-	-	-	-	-	14.672.078.930	
5	BAPPEDA	3.360.997.861	-	-	-	-	-	-	3.360.997.861	
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.622.312.801	-	-	-	-	-	-	5.622.312.801	
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.668.757.801	-	-	-	-	-	-	2.668.757.801	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.940.912.781	-	-	-	-	-	-	2.940.912.781	
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8.886.068.840	-	-	-	-	-	-	8.886.068.840	
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.228.744.841	-	-	-	-	-	-	5.228.744.841	
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.259.563.288	-	-	-	-	-	-	9.259.563.288	
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.471.755.753	-	-	-	-	-	-	1.471.755.753	
13	SATPOL PP	3.437.722.814	-	-	-	-	-	-	3.437.722.814	
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.097.770.373	-	-	-	-	-	-	2.097.770.373	
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.018.486.066	-	-	-	-	-	-	10.018.486.066	
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	706.934.844	-	-	-	-	-	-	706.934.844	
17	SETDA	13.017.977.259	-	-	-	-	-	-	13.017.977.259	
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.017.977.259	-	-	-	-	-	-	13.017.977.259	
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-	
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-	
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	SEKRETARIAT DPRD	3.785.974.662	-	-	-	-	-	-	3.785.974.662	
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.070.207.947	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	341.101.602.308	
a	(SKPD)	10.070.207.947	-	-	-	-	-	-	10.070.207.947	
b	(PPKD)	-	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	331.031.394.361	
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.211.270.907	-	-	-	-	-	-	3.211.270.907	
21	BKD	3.613.075.559	-	-	-	-	-	-	3.613.075.559	
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.454.772.932	-	-	-	-	-	-	1.454.772.932	
23	KECAMATAN REMBANG	5.180.107.696	-	-	-	-	-	-	5.180.107.696	
24	KECAMATAN KALIORI	2.041.431.386	-	-	-	-	-	-	2.041.431.386	
25	KECAMATAN SULANG	1.777.539.646	-	-	-	-	-	-	1.777.539.646	
26	KECAMATAN SUMBER	1.694.047.445	-	-	-	-	-	-	1.694.047.445	
27	KECAMATAN BULU	1.634.779.127	-	-	-	-	-	-	1.634.779.127	
28	KECAMATAN LASEM	1.920.614.184	-	-	-	-	-	-	1.920.614.184	
29	KECAMATAN PANCUR	2.094.039.809	-	-	-	-	-	-	2.094.039.809	
30	KECAMATAN SLUKE	1.496.752.406	-	-	-	-	-	-	1.496.752.406	
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.604.101.889	-	-	-	-	-	-	1.604.101.889	
32	KECAMATAN GUNEM	1.640.341.266	-	-	-	-	-	-	1.640.341.266	
33	KECAMATAN SALE	1.546.601.306	-	-	-	-	-	-	1.546.601.306	
34	KECAMATAN KRAGAN	1.942.028.267	-	-	-	-	-	-	1.942.028.267	
35	KECAMATAN SEDAN	1.718.215.397	-	-	-	-	-	-	1.718.215.397	
36	KECAMATAN SARANG	2.079.970.058	-	-	-	-	-	-	2.079.970.058	
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.972.293.984	-	-	-	-	-	-	1.972.293.984	
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.272.760.423	-	-	-	-	-	-	6.272.760.423	
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.336.331.555	-	-	-	-	-	-	8.336.331.555	
40	DINAS ESDM	2.246.227.931	-	-	-	-	-	-	2.246.227.931	
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.514.388.602	-	-	-	-	-	-	2.514.388.602	
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.236.022.869	-	-	-	-	-	-	4.236.022.869	
	JUMLAH	695.202.128.818	1.605.011	27.269.005.350	7.446.000.000	6.455.961.000	289.842.093.000	16.730.000	1.026.233.523.179	

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							JUALAH
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	43=35-3	44=36-4	45=37-5	46=38-6	47=39-7	48=40-8	49=41-9	50=
1	DINAS PENDIDIKAN	(4.001.771.567)	-	-	-	-	-	-	43+44+45+46+47+48+49
2	DINAS KESEHATAN	(199.578.750)	-	-	-	-	-	-	(4.001.771.567)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(64.761.987)	-	-	-	-	-	-	(199.578.750)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(206.346.070)	-	-	-	-	-	-	(64.761.987)
5	BAPPEDA	(144.654.139)	-	-	-	-	-	-	(206.346.070)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(121.138.399)	-	-	-	-	-	-	(144.654.139)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(113.343.199)	-	-	-	-	-	-	(121.138.399)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(66.839.219)	-	-	-	-	-	-	(113.343.199)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(229.075.160)	-	-	-	-	-	-	(66.839.219)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(143.048.159)	-	-	-	-	-	-	(229.075.160)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(76.020.712)	-	-	-	-	-	-	(143.048.159)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(73.864.247)	-	-	-	-	-	-	(76.020.712)
13	SATPOL PP	(105.892.186)	-	-	-	-	-	-	(73.864.247)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(81.539.627)	-	-	-	-	-	-	(105.892.186)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(199.076.934)	-	-	-	-	-	-	(81.539.627)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(94.855.156)	-	-	-	-	-	-	(199.076.934)
17	SETDA	(421.952.741)	-	-	-	-	-	-	(94.855.156)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	(421.952.741)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(421.952.741)	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	(421.952.741)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(95.018.338)	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.528.338.053)	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	-	-	(95.018.338)
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(1.528.338.053)
b	(PPKD)	(1.528.338.053)	-	-	-	-	-	-	(6.257.770.192)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	-	-	-
21	BKD	(178.928.093)	-	-	-	-	-	-	(1.528.338.053)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(110.410.441)	-	-	-	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(4.729.432.139)
23	KECAMATAN REMBANG	(210.633.304)	-	-	-	-	-	-	(178.928.093)
24	KECAMATAN KALIORI	(92.687.614)	-	-	-	-	-	-	(110.410.441)
25	KECAMATAN SULANG	(71.198.354)	-	-	-	-	-	-	(84.018.068)
26	KECAMATAN SUMBER	(80.219.555)	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	(73.936.873)	-	-	-	-	-	-	(210.633.304)
28	KECAMATAN LASEM	(98.349.818)	-	-	-	-	-	-	(92.687.614)
29	KECAMATAN PANCUR	(75.124.191)	-	-	-	-	-	-	(71.198.354)
30	KECAMATAN SLUKE	(77.865.594)	-	-	-	-	-	-	(80.219.555)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(82.387.131)	-	-	-	-	-	-	(73.936.873)
32	KECAMATAN GUNEM	(76.740.734)	-	-	-	-	-	-	(98.349.818)
33	KECAMATAN SALE	(60.077.894)	-	-	-	-	-	-	(75.124.191)
34	KECAMATAN KRAGAN	(64.566.733)	-	-	-	-	-	-	(77.865.594)
35	KECAMATAN SEDAN	(116.284.603)	-	-	-	-	-	-	(82.387.131)
36	KECAMATAN SARANG	(73.231.942)	-	-	-	-	-	-	(76.740.734)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(88.432.016)	-	-	-	-	-	-	(60.077.894)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(195.682.577)	-	-	-	-	-	-	(64.566.733)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	(105.240.445)	-	-	-	-	-	-	(116.284.603)
40	DINAS ESDM	(159.717.069)	-	-	-	-	-	-	(73.231.942)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(139.938.398)	-	-	-	-	-	-	(88.432.016)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(108.429.131)	-	-	-	-	-	-	(195.682.577)
JUMLAH		(10.370.993.019)	(35.394.989)	(2.678.600.150)	(254.000.000)	-	(1.008.792.000)	(752.645.000)	(108.429.131)
									(15.100.425.158)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	%							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
1	DINAS PENDIDIKAN	99,16							
2	DINAS KESEHATAN	99,50							99,16
3	RSUD dr R. SOETRASNO	99,74							99,50
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	98,61							99,74
5	BAPPEDA	95,87							98,61
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	97,89							95,87
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	95,93							97,89
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97,78							95,93
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	97,49							97,78
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	97,34							97,49
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	99,19							97,34
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95,22							99,19
13	SATPOL PP	97,01							95,22
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	96,26							97,01
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	98,05							96,26
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	88,19							98,05
17	SETDA	96,86							88,19
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								96,86
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	96,86							
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								96,86
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
18	SEKRETARIAT DPRD	97,55							
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86,82	4,34	91,06	96,70	100,00	99,65	2,17	97,55
a	(SKPD)								
b	(PPKD)	86,82							98,20
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		4,34	91,06	96,70	100,00	99,65	2,17	86,82
21	BKD	94,72							98,59
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	97,03							94,72
23	KECAMATAN REMBANG	96,09							97,03
24	KECAMATAN KALIORI	95,86							95,78
25	KECAMATAN SULANG	96,15							
26	KECAMATAN SUMBER	95,48							96,09
27	KECAMATAN BULU	95,87							95,86
28	KECAMATAN LASEM	95,13							96,15
29	KECAMATAN PANCUR	96,54							95,48
30	KECAMATAN SLUKE	95,05							95,67
31	KECAMATAN PAMOTAN	95,11							95,13
32	KECAMATAN GUNEM	95,53							96,54
33	KECAMATAN SALE	96,26							95,05
34	KECAMATAN KRAGAN	96,78							95,11
35	KECAMATAN SEDAN	93,86							95,53
36	KECAMATAN SARANG	96,60							96,26
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	95,71							96,78
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	96,97							93,86
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	98,75							96,60
40	DINAS ESDM	93,36							95,71
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	94,73							96,97
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,50							98,75
	JUMLAH	98,53	4,34	91,06	96,70	100,00	99,65	2,17	97,50
									98,55

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	10.759.341.000,00	15.628.166.500,00	70.435.828.200,00	96.823.335.700,00
2	DINAS KESEHATAN	30.478.620.673,00	39.155.869.272,00	54.568.471.200,00	124.202.961.145,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43.389.478.976,00	33.714.461.000,00	25.426.012.376,00	102.529.952.352,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	5.643.910.600,00	10.303.426.300,00	189.800.563.148,00	205.747.900.048,00
5	BAPPEDA	2.975.782.000,00	6.346.500.000,00	193.150.000,00	9.515.432.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.551.700.000,00	2.982.256.750,00	766.514.250,00	5.300.471.000,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	584.710.000,00	1.192.277.000,00	2.477.503.000,00	4.254.490.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.134.078.000,00	1.301.676.300,00	551.887.500,00	2.987.641.800,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELOMPOK DAN KELUARGA BENCANA	2.858.744.000,00	6.557.908.000,00	2.276.769.310,00	11.693.421.310,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.871.889.000,00	4.339.157.500,00	1.498.751.500,00	7.709.798.000,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMI	1.821.268.000,00	3.163.565.749,00	21.867.184.000,00	26.852.017.749,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT	2.997.910.000,00	2.174.650.000,00	35.500.000,00	5.208.060.000,00
13	SATPOL PP	1.358.215.000,00	1.169.692.000,00	4.221.191.000,00	6.749.098.000,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	920.000.000,00	2.061.504.000,00	510.400.000,00	3.491.904.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	17.693.920.000,00	16.011.137.200,00	6.852.582.800,00	40.557.640.000,00
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	652.600.000,00	532.354.000,00	15.046.000,00	1.200.000.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	3.098.668.000,00	16.041.676.000,00	406.446.000,00	19.546.790.000,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.335.228.000,00	7.423.857.000,00	3.245.857.532,00	16.004.942.532,00
a	(SKPD)	5.335.228.000,00	7.423.857.000,00	3.245.857.532,00	16.004.942.532,00
b	(PPKD)				
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.017.550.000,00	1.795.740.000,00	495.300.000,00	6.308.590.000,00
21	BKD	2.347.100.000,00	4.332.295.000,00	639.050.000,00	7.318.445.000,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	453.705.000,00	705.185.000,00	263.630.000,00	1.422.520.000,00
23	KECAMATAN REMBANG	641.440.000,00	804.929.000,00	2.082.015.000,00	3.528.384.000,00
24	KECAMATAN KALIORI	144.246.000,00	369.258.000,00	263.700.000,00	777.204.000,00
25	KECAMATAN SULANG	287.639.000,00	422.655.000,00	674.850.000,00	1.385.144.000,00
26	KECAMATAN SUMBER	183.320.000,00	425.785.000,00	110.995.000,00	720.100.000,00
27	KECAMATAN BULU	176.435.000,00	272.925.000,00	398.200.000,00	847.560.000,00
28	KECAMATAN LASEM	177.444.000,00	268.740.000,00	329.920.000,00	776.104.000,00
29	KECAMATAN PANCUR	185.420.000,00	333.170.000,00	240.010.000,00	758.600.000,00
30	KECAMATAN SLUKE	187.046.000,00	258.454.000,00	291.100.000,00	736.600.000,00
31	KECAMATAN PAMOTAN	267.130.000,00	356.730.000,00	172.500.000,00	796.360.000,00
32	KECAMATAN GUNEM	198.407.000,00	272.213.000,00	310.350.000,00	780.970.000,00
33	KECAMATAN SALE	272.635.000,00	364.290.000,00	195.000.000,00	831.925.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN	186.229.000,00	478.184.000,00	645.213.000,00	1.309.626.000,00
35	KECAMATAN SEDAN	275.350.000,00	284.670.000,00	132.200.000,00	692.220.000,00
36	KECAMATAN SARANG	175.450.000,00	343.450.000,00	362.500.000,00	881.400.000,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	361.380.000,00	1.145.199.950,00	796.700.050,00	2.303.280.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.583.019.000,00	43.749.456.000,00	3.616.835.472,00	49.949.310.472,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN DAERAH LULUSAN	1.157.503.000,00	2.739.647.200,00	2.269.047.800,00	6.166.198.000,00
40	DINAS ESDM	501.238.000,00	11.330.477.000,00	2.711.300.000,00	14.543.015.000,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	1.661.465.500,00	5.426.914.500,00	6.931.760.000,00	14.020.140.000,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.453.305.000,00	5.390.669.000,00	18.668.142.815,00	27.512.116.815,00
	JUMLAH	154.367.919.749,00	251.438.817.221,00	427.734.930.953,00	833.541.667.923,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	REALISASI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	9.228.758.600,00	13.186.974.644,00	32.583.404.447,00	54.999.137.691,00
2	DINAS KESEHATAN	24.644.003.787,00	30.663.409.113,00	51.547.322.101,00	106.854.735.001,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.353.143.337,00	33.844.353.676,58	14.033.952.249,00	92.231.449.262,58
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.749.557.000,00	7.046.605.140,00	164.772.508.276,00	176.568.670.416,00
5	BAPPEDA	2.855.276.000,00	6.159.566.925,00	192.454.000,00	9.207.296.925,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.495.545.000,00	2.801.750.501,00	731.886.689,00	5.029.182.190,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	579.110.000,00	1.141.107.725,00	2.407.421.800,00	4.127.639.525,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPU	1.083.598.885,00	1.207.211.633,00	498.999.758,00	2.789.810.276,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA/KELURAHAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.846.869.000,00	6.478.551.217,00	1.907.410.776,00	11.232.830.993,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.728.575.000,00	3.600.401.498,00	1.429.480.402,00	6.758.456.900,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMI	1.673.005.000,00	2.765.549.569,00	20.717.359.320,00	25.155.913.889,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERINDUKAN MASYARAKAT	2.991.850.800,00	2.093.536.917,00	34.800.000,00	5.120.187.717,00
13	SATPOL PP	1.301.225.000,00	1.083.056.875,00	4.194.160.500,00	6.578.442.375,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	874.495.000,00	1.654.520.000,00	489.415.995,00	3.018.430.995,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	17.432.984.000,00	14.196.240.316,00	6.597.311.882,00	38.226.536.198,00
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	624.750.000,00	423.447.250,00	15.044.680,00	1.063.241.930,00
18	SEKRETARIAT DPRD	2.993.148.000,00	12.733.682.574,00	354.387.500,00	16.081.218.074,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.881.407.000,00	6.236.967.840,00	2.956.597.275,00	14.074.972.115,00
a	(SKPD)	4.881.407.000,00	6.236.967.840,00	2.956.597.275,00	14.074.972.115,00
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.890.275.000,00	1.626.289.864,00	458.661.075,00	5.975.225.939,00
21	BKD	2.198.160.000,00	3.922.389.941,00	600.490.950,00	6.721.040.891,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	446.955.000,00	669.937.239,00	254.273.000,00	1.371.165.239,00
23	KECAMATAN REMBANG	631.780.000,00	779.435.350,00	2.028.758.700,00	3.439.974.050,00
24	KECAMATAN KALIORI	139.446.000,00	358.614.968,00	259.539.850,00	757.600.818,00
25	KECAMATAN SULANG	248.069.000,00	375.157.000,00	644.237.000,00	1.267.463.000,00
26	KECAMATAN SUMBER	176.880.000,00	372.044.641,00	109.073.000,00	657.997.641,00
27	KECAMATAN BULU	176.435.000,00	251.974.500,00	393.169.980,00	821.579.480,00
28	KECAMATAN LASEM	177.444.000,00	266.601.647,00	324.212.494,00	768.258.141,00
29	KECAMATAN PANCUR	183.640.000,00	331.171.072,00	237.890.000,00	752.701.072,00
30	KECAMATAN SLUKE	185.496.000,00	252.602.852,00	270.915.200,00	709.014.052,00
31	KECAMATAN PAMOTAN	266.130.000,00	356.046.000,00	169.468.000,00	791.644.000,00
32	KECAMATAN GUNEM	194.389.000,00	261.338.150,00	304.730.000,00	760.457.150,00
33	KECAMATAN SALE	272.635.000,00	362.400.000,00	194.578.000,00	829.613.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN	186.229.000,00	459.787.000,00	634.092.000,00	1.280.108.000,00
35	KECAMATAN SEDAN	272.200.000,00	237.600.000,00	129.510.000,00	639.310.000,00
36	KECAMATAN SARANG	175.450.000,00	336.074.371,00	352.431.500,00	863.955.871,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	360.230.000,00	1.112.276.707,00	791.451.000,00	2.263.957.707,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.211.332.760,00	38.273.907.879,00	3.432.321.172,00	43.917.561.811,00
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAYANAN DESA/KELURAHAN	1.135.093.000,00	2.713.103.913,00	2.131.977.300,00	5.980.174.213,00
40	DINAS ESDM	479.864.000,00	8.372.861.170,00	2.484.306.200,00	11.337.031.370,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	1.536.982.000,00	4.943.962.451,00	5.796.484.294,00	12.277.428.745,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.306.454.000,00	4.431.654.401,00	18.094.277.616,00	25.832.386.017,00
	JUMLAH	144.564.120.189,00	217.960.717.279,58	345.545.721.301,00	708.070.558.749,58

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		(Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=11+12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	(1.530.582.400,00)	(2.441.191.856,00)	(37.852.423.753,00)	(41.824.198.009,00)
2	DINAS KESEHATAN	(5.834.616.886,00)	(8.492.460.159,00)	(3.021.149.099,00)	(17.348.226.144,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	963.664.361,00	129.892.676,58	(11.392.060.127,00)	(10.298.503.089,42)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(894.353.600,00)	(3.256.821.160,00)	(25.028.054.872,00)	(29.179.229.632,00)
5	BAPPEDA	(120.506.000,00)	(186.933.075,00)	(696.000,00)	(308.135.075,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(56.155.000,00)	(180.506.249,00)	(34.627.561,00)	(271.288.810,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(5.600.000,00)	(51.169.275,00)	(70.081.200,00)	(126.850.475,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(50.479.115,00)	(94.464.667,00)	(52.887.742,00)	(197.831.524,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN KELUARGA BERENCANA	(11.875.000,00)	(79.356.783,00)	(369.358.534,00)	(460.590.317,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(143.314.000,00)	(738.756.002,00)	(69.271.098,00)	(951.341.100,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMI	(148.263.000,00)	(398.016.180,00)	(1.149.824.680,00)	(1.696.103.860,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PEDULINGAN MASYARAKAT	(6.059.200,00)	(81.113.083,00)	(700.000,00)	(87.872.283,00)
13	SATPOL PP	(56.990.000,00)	(86.635.125,00)	(27.030.500,00)	(170.655.625,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(45.505.000,00)	(406.984.000,00)	(20.984.005,00)	(473.473.005,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	(260.936.000,00)	(1.814.896.884,00)	(255.270.918,00)	(2.331.103.802,00)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(27.850.000,00)	(108.906.750,00)	(1.320,00)	(136.758.070,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	(105.520.000,00)	(3.307.993.426,00)	(52.058.500,00)	(3.465.571.926,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(453.821.000,00)	(1.186.889.160,00)	(289.260.257,00)	(1.929.970.417,00)
a	(SKPD)	(453.821.000,00)	(1.186.889.160,00)	(289.260.257,00)	(1.929.970.417,00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(127.275.000,00)	(169.450.136,00)	(36.638.925,00)	(333.364.061,00)
21	BKD	(148.940.000,00)	(409.905.059,00)	(38.559.050,00)	(597.404.109,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(6.750.000,00)	(35.247.761,00)	(9.357.000,00)	(51.354.761,00)
23	KECAMATAN REMBANG	(9.660.000,00)	(25.493.650,00)	(53.256.300,00)	(88.409.950,00)
24	KECAMATAN KALIORI	(4.800.000,00)	(10.643.032,00)	(4.160.150,00)	(19.603.182,00)
25	KECAMATAN SULANG	(39.570.000,00)	(47.498.000,00)	(30.613.000,00)	(117.681.000,00)
26	KECAMATAN SUMBER	(6.440.000,00)	(53.740.359,00)	(1.922.000,00)	(62.102.359,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(20.950.500,00)	(5.030.020,00)	(25.980.520,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(2.138.353,00)	(5.707.506,00)	(7.845.859,00)
29	KECAMATAN PANCUR	(1.780.000,00)	(1.998.928,00)	(2.120.000,00)	(5.898.928,00)
30	KECAMATAN SLUKE	(1.550.000,00)	(5.851.148,00)	(20.184.800,00)	(27.585.948,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(1.000.000,00)	(684.000,00)	(3.032.000,00)	(4.716.000,00)
32	KECAMATAN GUNEM	(4.018.000,00)	(10.874.850,00)	(5.620.000,00)	(20.512.850,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(1.890.000,00)	(422.000,00)	(2.312.000,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(18.397.000,00)	(11.121.000,00)	(29.518.000,00)
35	KECAMATAN SEDAN	(3.150.000,00)	(47.070.000,00)	(2.690.000,00)	(52.910.000,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(7.375.629,00)	(10.068.500,00)	(17.444.129,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(1.150.000,00)	(32.923.243,00)	(5.249.050,00)	(39.322.293,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(371.686.240,00)	(5.475.548.121,00)	(184.514.300,00)	(6.031.748.661,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN	(22.410.000,00)	(26.543.287,00)	(137.070.500,00)	(186.023.787,00)
40	DINAS ESDM	(21.374.000,00)	(2.957.615.830,00)	(226.993.800,00)	(3.205.983.630,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	(124.483.500,00)	(482.952.049,00)	(1.135.275.706,00)	(1.742.711.255,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(146.851.000,00)	(959.014.599,00)	(573.865.199,00)	(1.679.730.798,00)
	JUMLAH	(9.803.799.580,00)	(33.478.099.941,42)	(82.189.209.652,00)	(125.471.109.173,42)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		%			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18
1	DINAS PENDIDIKAN	85,77	84,38	46,26	56,80
2	DINAS KESEHATAN	80,86	78,31	94,46	86,03
3	RSUD dr R. SOETRASNO	102,22	100,39	55,20	89,96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	84,15	68,39	86,81	85,82
5	BAPPEDA	95,95	97,05	99,64	96,76
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96,38	93,95	95,48	94,88
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	99,04	95,71	97,17	97,02
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	95,55	92,74	90,42	93,38
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREKONOMIAN DAN KELUARGA BERENCANA	99,58	98,79	83,78	96,06
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	92,34	82,97	95,38	87,66
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	91,86	87,42	94,74	93,68
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERINDUSTRIAN MASYARAKAT	99,80	96,27	98,03	98,31
13	SATPOL PP	95,80	92,59	99,36	97,47
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95,05	80,26	95,89	86,44
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	98,53	88,66	96,27	94,25
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	95,73	79,54	99,99	88,60
18	SEKRETARIAT DPRD	96,59	79,38	87,19	82,27
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	91,49	84,01	91,09	87,94
a	(SKPD)	91,49	84,01	91,09	87,94
b	(PPKD)				
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	96,83	90,56	92,60	94,72
21	BKD	93,65	90,54	93,97	91,84
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	98,51	95,00	96,45	96,39
23	KECAMATAN REMBANG	98,49	96,83	-	97,49
24	KECAMATAN KALIORI	96,67	97,12	98,42	97,48
25	KECAMATAN SULANG	86,24	88,76	-	91,50
26	KECAMATAN SUMBER	96,49	87,38	-	91,38
27	KECAMATAN BULU	100,00	92,32	98,74	96,93
28	KECAMATAN LASEM	100,00	99,20	98,27	98,99
29	KECAMATAN PANCUR	99,04	99,40	-	99,22
30	KECAMATAN SLUKE	99,17	97,74	93,07	96,25
31	KECAMATAN PAMOTAN	99,63	99,81	98,24	99,41
32	KECAMATAN GUNEM	97,97	96,01	-	97,37
33	KECAMATAN SALE	100,00	99,48	-	99,72
34	KECAMATAN KRAGAN	100,00	96,15	98,28	97,75
35	KECAMATAN SEDAN	98,86	83,47	97,97	92,36
36	KECAMATAN SARANG	100,00	97,85	97,22	98,02
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	99,68	97,13	99,34	98,29
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	85,61	87,48	94,90	87,92
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	98,06	99,03	93,96	96,98
40	DINAS ESDM	95,74	73,90	91,63	77,96
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	92,51	91,10	83,62	87,57
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,75	82,21	96,93	93,89
	JUMLAH	93,65	86,69	80,79	84,95

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		MENJADI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19	20	21	22=19+20+21
1	DINAS PENDIDIKAN	9.228.758.600,00	13.186.974.644,00	32.583.404.447,00	54.999.137.691,00
2	DINAS KESEHATAN	24.644.003.787,00	30.663.409.113,00	51.547.322.101,00	106.854.735.001,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.353.143.337,00	33.844.353.676,58	14.033.952.249,00	92.231.449.262,58
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.749.557.000,00	7.046.605.140,00	164.772.508.276,00	176.568.670.416,00
5	BAPPEDA	2.855.276.000,00	6.159.566.925,00	192.454.000,00	9.207.296.925,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.495.545.000,00	2.801.750.501,00	731.886.689,00	5.029.182.190,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	579.110.000,00	1.141.107.725,00	2.407.421.800,00	4.127.639.525,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.083.598.885,00	1.207.211.633,00	498.999.758,00	2.789.810.276,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREKONOMIAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.846.869.000,00	6.478.551.217,00	1.907.410.776,00	11.232.830.993,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.728.575.000,00	3.600.401.498,00	1.429.480.402,00	6.758.456.900,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.673.005.000,00	2.765.549.569,00	20.717.359.320,00	25.155.913.889,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERUMUDAHAN MASYARAKAT	2.991.850.800,00	2.093.536.917,00	34.800.000,00	5.120.187.717,00
13	SATPOL PP	1.301.225.000,00	1.083.056.875,00	4.194.160.500,00	6.578.442.375,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	874.495.000,00	1.654.520.000,00	489.415.995,00	3.018.430.995,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	17.432.984.000,00	14.196.240.316,00	6.597.311.882,00	38.226.536.198,00
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	624.750.000,00	423.447.250,00	15.044.680,00	1.063.241.930,00
18	SEKRETARIAT DPRD	2.993.148.000,00	12.733.682.574,00	354.387.500,00	16.081.218.074,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.881.407.000,00	6.236.967.840,00	2.956.597.275,00	14.074.972.115,00
a	(SKPD)	4.881.407.000,00	6.236.967.840,00	2.956.597.275,00	14.074.972.115,00
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.890.275.000,00	1.626.289.864,00	458.661.075,00	5.975.225.939,00
21	BKD	2.198.160.000,00	3.922.389.941,00	600.490.950,00	6.721.040.891,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	446.955.000,00	669.937.239,00	254.273.000,00	1.371.165.239,00
23	KECAMATAN REMBANG	631.780.000,00	779.435.350,00	2.028.758.700,00	3.439.974.050,00
24	KECAMATAN KALIORI	139.446.000,00	358.614.968,00	259.539.850,00	757.600.818,00
25	KECAMATAN SULANG	248.069.000,00	375.157.000,00	644.237.000,00	1.267.463.000,00
26	KECAMATAN SUMBER	176.880.000,00	372.044.641,00	109.073.000,00	657.997.641,00
27	KECAMATAN BULU	176.435.000,00	251.974.500,00	393.169.980,00	821.579.480,00
28	KECAMATAN LASEM	177.444.000,00	266.601.647,00	324.212.494,00	768.258.141,00
29	KECAMATAN PANCUR	183.640.000,00	331.171.072,00	237.890.000,00	752.701.072,00
30	KECAMATAN SLUKE	185.496.000,00	252.602.852,00	270.915.200,00	709.014.052,00
31	KECAMATAN PAMOTAN	266.130.000,00	356.046.000,00	169.468.000,00	791.644.000,00
32	KECAMATAN GUNEM	194.389.000,00	261.338.150,00	304.730.000,00	760.457.150,00
33	KECAMATAN SALE	272.635.000,00	362.400.000,00	194.578.000,00	829.613.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN	186.229.000,00	459.787.000,00	634.092.000,00	1.280.108.000,00
35	KECAMATAN SEDAN	272.200.000,00	237.600.000,00	129.510.000,00	639.310.000,00
36	KECAMATAN SARANG	175.450.000,00	336.074.371,00	352.431.500,00	863.955.871,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	360.230.000,00	1.112.276.707,00	791.451.000,00	2.263.957.707,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.211.332.760,00	38.273.907.879,00	3.432.321.172,00	43.917.561.811,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULIHAN	1.135.093.000,00	2.713.103.913,00	2.131.977.300,00	5.980.174.213,00
40	DINAS ESDM	479.864.000,00	8.372.861.170,00	2.484.306.200,00	11.337.031.370,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	1.536.982.000,00	4.943.962.451,00	5.796.484.294,00	12.277.428.745,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.306.454.000,00	4.431.654.401,00	18.094.277.616,00	25.832.386.017,00
	JUMLAH	144.564.120.169,00	217.960.717.279,58	345.545.721.301,00	708.070.558.749,58

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=23+24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	(1.530.582.400,00)	(2.441.191.856,00)	(37.852.423.753,00)	(41.824.198.009,00)
2	DINAS KESEHATAN	(5.834.616.886,00)	(8.492.460.159,00)	(3.021.149.099,00)	(17.348.226.144,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	963.664.361,00	129.892.676,58	(11.392.060.127,00)	(10.298.503.089,42)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(894.353.600,00)	(3.256.821.160,00)	(25.028.054.872,00)	(29.179.229.632,00)
5	BAPPEDA	(120.506.000,00)	(186.933.075,00)	(696.000,00)	(308.135.075,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(56.155.000,00)	(180.506.249,00)	(34.627.561,00)	(271.288.810,00)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(5.600.000,00)	(51.169.275,00)	(70.081.200,00)	(126.850.475,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(50.479.115,00)	(94.464.667,00)	(52.887.742,00)	(197.831.524,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(11.875.000,00)	(79.356.783,00)	(369.358.534,00)	(460.590.317,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(143.314.000,00)	(738.756.002,00)	(69.271.098,00)	(951.341.100,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(148.263.000,00)	(398.016.180,00)	(1.149.824.680,00)	(1.696.103.860,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(6.059.200,00)	(81.113.083,00)	(700.000,00)	(87.872.283,00)
13	SATPOL PP	(56.990.000,00)	(86.635.125,00)	(27.030.500,00)	(170.655.625,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(45.505.000,00)	(406.984.000,00)	(20.984.005,00)	(473.473.005,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	(260.936.000,00)	(1.814.896.884,00)	(255.270.918,00)	(2.331.103.802,00)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(27.850.000,00)	(108.906.750,00)	(1.320,00)	(136.758.070,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	(105.520.000,00)	(3.307.993.426,00)	(52.058.500,00)	(3.465.571.926,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(453.821.000,00)	(1.186.889.160,00)	(289.260.257,00)	(1.929.970.417,00)
a	(SKPD)	(453.821.000,00)	(1.186.889.160,00)	(289.260.257,00)	(1.929.970.417,00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(127.275.000,00)	(169.450.136,00)	(36.638.925,00)	(333.364.061,00)
21	BKD	(148.940.000,00)	(409.905.059,00)	(38.559.050,00)	(597.404.109,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(6.750.000,00)	(35.247.761,00)	(9.357.000,00)	(51.354.761,00)
23	KECAMATAN REMBANG	(9.660.000,00)	(25.493.650,00)	(53.256.300,00)	(88.409.950,00)
24	KECAMATAN KALIORI	(4.800.000,00)	(10.643.032,00)	(4.160.150,00)	(19.603.182,00)
25	KECAMATAN SULANG	(39.570.000,00)	(47.498.000,00)	(30.613.000,00)	(117.681.000,00)
26	KECAMATAN SUMBER	(6.440.000,00)	(53.740.359,00)	(1.922.000,00)	(62.102.359,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(20.950.500,00)	(5.030.020,00)	(25.980.520,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(2.138.353,00)	(5.707.506,00)	(7.845.859,00)
29	KECAMATAN PANCUR	(1.780.000,00)	(1.998.928,00)	(2.120.000,00)	(5.898.928,00)
30	KECAMATAN SLUKE	(1.550.000,00)	(5.851.148,00)	(20.184.800,00)	(27.585.948,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(1.000.000,00)	(684.000,00)	(3.032.000,00)	(4.716.000,00)
32	KECAMATAN GUNEM	(4.018.000,00)	(10.874.850,00)	(5.620.000,00)	(20.512.850,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(1.890.000,00)	(422.000,00)	(2.312.000,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(18.397.000,00)	(11.121.000,00)	(29.518.000,00)
35	KECAMATAN SEDAN	(3.150.000,00)	(47.070.000,00)	(2.690.000,00)	(52.910.000,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(7.375.629,00)	(10.068.500,00)	(17.444.129,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(1.150.000,00)	(32.923.243,00)	(5.249.050,00)	(39.322.293,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(371.686.240,00)	(5.475.548.121,00)	(184.514.300,00)	(6.031.748.661,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAYANAN BENIH/ULIHAN	(22.410.000,00)	(26.543.287,00)	(137.070.500,00)	(186.023.787,00)
40	DINAS ESDM	(21.374.000,00)	(2.957.615.830,00)	(226.993.800,00)	(3.205.983.630,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	(124.483.500,00)	(482.952.049,00)	(1.135.275.706,00)	(1.742.711.255,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(146.851.000,00)	(959.014.599,00)	(573.865.199,00)	(1.679.730.798,00)
	JUMLAH	(9.803.799.580,00)	(33.478.099.941,42)	(82.189.209.652,00)	(125.471.109.173,42)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		%			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	27	28	29	30
1	DINAS PENDIDIKAN	85,77	84,38	46,26	56,80
2	DINAS KESEHATAN	80,86	78,31	94,46	86,03
3	RSUD dr R. SOETRASNO	102,22	100,39	55,20	89,96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	84,15	68,39	86,81	85,82
5	BAPPEDA	95,95	97,05	99,64	96,76
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96,38	93,95	95,48	94,88
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	99,04	95,71	97,17	97,02
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN CIVIL	95,55	92,74	90,42	93,38
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	99,58	98,79	83,78	96,06
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	92,34	82,97	95,38	87,66
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL	91,86	87,42	94,74	93,68
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	99,80	96,27	98,03	98,31
13	SATPOL PP	95,80	92,59	99,36	97,47
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95,05	80,26	95,89	86,44
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	98,53	88,66	96,27	94,25
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	95,73	79,54	99,99	88,60
18	SEKRETARIAT DPRD	96,59	79,38	87,19	82,27
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	91,49	84,01	91,09	87,94
a	(SKPD)	91,49	84,01	91,09	87,94
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	96,83	90,56	92,60	94,72
21	BKD	93,65	90,54	93,97	91,84
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	98,51	95,00	96,45	96,39
23	KECAMATAN REMBANG	98,49	96,83	97,44	97,49
24	KECAMATAN KALIORI	96,67	97,12	98,42	97,48
25	KECAMATAN SULANG	86,24	88,76	95,46	91,50
26	KECAMATAN SUMBER	96,49	87,38	98,27	91,38
27	KECAMATAN BULU	100,00	92,32	98,74	96,93
28	KECAMATAN LASEM	100,00	99,20	98,27	98,99
29	KECAMATAN PANCUR	99,04	99,40	99,12	99,22
30	KECAMATAN SLUKE	99,17	97,74	93,07	96,25
31	KECAMATAN PAMOTAN	99,63	99,81	98,24	99,41
32	KECAMATAN GUNEM	97,97	96,01	98,19	97,37
33	KECAMATAN SALE	100,00	99,48	99,78	99,72
34	KECAMATAN KRAGAN	100,00	96,15	98,28	97,75
35	KECAMATAN SEDAN	98,86	83,47	97,97	92,36
36	KECAMATAN SARANG	100,00	97,85	97,22	98,02
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	99,68	97,13	99,34	98,29
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	85,61	87,48	94,90	87,92
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	98,06	99,03	93,96	96,98
40	DINAS ESDM	95,74	73,90	91,63	77,96
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLIMPIADA	92,51	91,10	83,62	87,57
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,75	82,21	96,93	93,89
	JUMLAH	93,65	86,69	80,79	84,95

B. CATATAN :

Dalam pembahasan Komisi bersama OPD terkait, ada beberapa Kepala OPD termasuk para Camat kurang bisa mengindahkan undangan/instruksi Bupati untuk memenuhi undangan rapat kerja, maka agar Saudara Bupati menegur beberapa Kepala OPD yang tidak bisa hadir secara langsung.

C. REKOMENDASI :

1. Untuk mencapai opini WTP Tahun 2018 dimohon Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan BPPKAD menggunakan jasa pihak ke tiga guna menyelesaikan masalah aset yang menjadi permasalahan setiap tahunnya
2. Pihak Perbankan mengeluhkan tingginya NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, dikarenakan nelayan cantrang tidak di perbolehkan melaut. Dan dampak dari terlambatnya pembangunan infrastruktur menyebabkan kreditor Bank menjadi menurun, dimohon Pemerintah Daerah mencari solusi.
3. Banyaknya transaksi penjualan ikan di luar TPI Tasik Agung yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, dimohon agar Pemerintah Kabupaten Rembang menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
4. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan dana untuk premi asuransi bagi nelayan, petani garam dan pembudi daya ikan sesuai dengan amanah UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
5. Semua Pokja - Pokja ULP yang dibentuk oleh Bagian Administrasi Pembangunan setelah melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya harus melaporkan hasilnya ke PPK masing - masing sebagai bahan controlling dan evaluasi ke Bagian Administrasi Pembangunan.

6. Perencanaan kegiatan harus direncanakan pada tahun sebelumnya atau T - 1 dan segera dapat dilelangkan diawal tahun, sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.
7. Pada tahun anggaran 2018 mendatang perlu dianggarkan pengadaan Jembatan Baily (jembatan darurat) dan pakaian identitas khusus di lapangan pada BPBD.
8. Perlu penambahan tenaga teknis pada DPU yang profesional dan berani untuk melaksanakan pekerjaan.
9. Tingginya Silpa Belanja dari sektor pembangunan infrastruktur agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Rembang mengingat visi misi Bupati Rembang untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Rembang.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna IV (empat) DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN

Ketua,
ttd

Sekretaris
ttd

H. MAJID KAMIL MZ Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF

Rembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DI SAMPULKAN DAN AWAL RAYAPATI DAN PERUBAHAN DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, SEPTEMBER 2015

Dibacakan oleh: WIKHAYAT ZAINURI

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2016**

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah, Wassholatu wassalamu a'laa Rosulillah ibni Abdillah, Wa a'la alihi
Washohbihi wamanwalah..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang dimulyakan ALLAH SWT.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2016, meskipun dari hasil pembahasan, masih banyak adanya catatan kekurangan - kekurangan yang mesti harus diperbaiki, untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Kami sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2016 oleh sdr. Bupati, sampai Pembahasan ditingkat komisi bersama OPD, dan juga Banggar bersama TAPD.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan, untuk masukan, saran dan himbauan, sebagai berikut:

1. Dari hasil pencermatan kami, Postur APBD Tahun Anggaran 2016 lalu, untuk rasio porsi Perbandingan, antara Belanja Tidak Langsung (59,17 %) dengan Belanja Langsung (40,82 %), masih jauh lebih besar pada Belanja Tidak Langsung, artinya Anggaran masih banyak diperuntukkan pada belanja Pegawai. Dan Anggaran yang diperuntukkan Belanja Modal untuk Infra Struktur dan Pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang, Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengusulkan agar Penganggaran ditahun ke depan, Porsi Belanja Langsung bisa diperbesar, sehingga apa yang menjadi usulan dan harapan masyarakat dapat segera terpenuhi, yaitu penanganan Infrastruktural, baik Sarana Jalan Umum maupun yang lainnya.
2. Berkaitan dengan keterbatasan personil yang skil dibidang teknik sipil, di DPU Taru maupun Dinperkim, sehingga menurut hemat kami, Progres pelaksanaan kegiatan infra struktur sampai bulan Juli ini masih lambat. Terkait dengan hal tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Pemkab mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk persiapan menyusun dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2017, untuk segera ditindak lanjuti dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 secara keseluruhan, menyampaikan pendapat akhir , dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2016 , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2016.

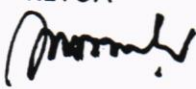
Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016 .

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq....., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 17 Juli 2017

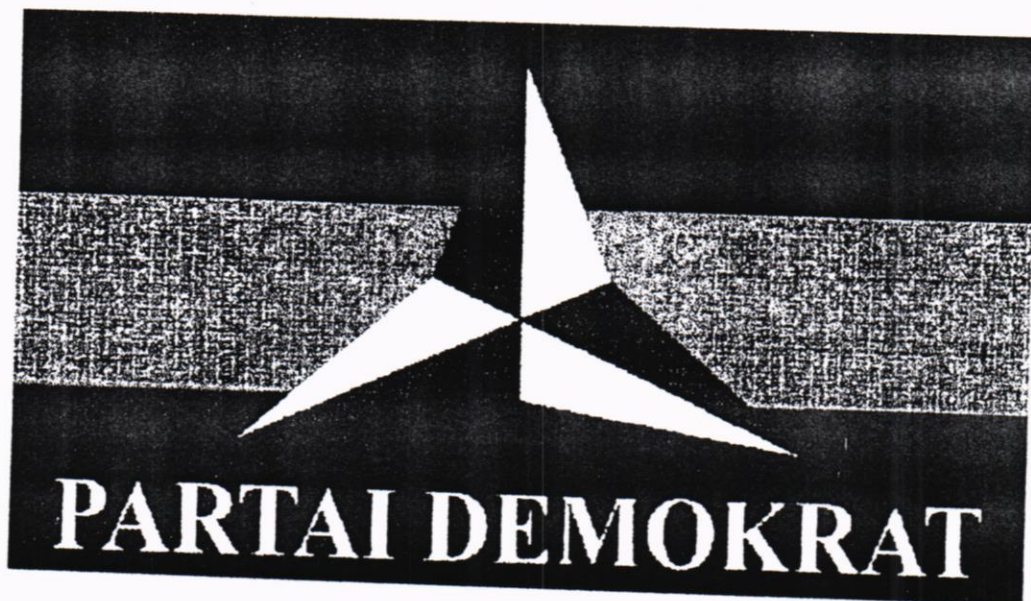
KETUA

SUGIHARTO



SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 17 Juli 2017
Dibacakan oleh : H. HARNO, S.E.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2016**

SENIN, 17 JULI 2017

Dibacakan oleh : H. HARNO, S.E.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali pendapat fraksi ini, kami mengajak kepada hadirin yang terhormat marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi semoga mendapat hasil dan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Demokrat **Menerima dan Menyetujui** Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 ditetapkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti, yaitu :

Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan yang sudah rusak parah secepatnya diperbaiki karena masyarakat sudah lama menantikan jalan-jalan yang bagus dan kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Rembang supaya pandangan umum kami diparipurna terdahulu supaya ditindak lanjuti.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan

perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juli 2017

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh :

.....

Pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang Senin 17 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wrwb.

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Rapat Paripirna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah , marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya , nikmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini Senin 17 Juli 2017 kita masih diberi Rahmat dengan penuh kebahagiaan , sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat , dan dapat menghadiri acara Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Kedua kalinya tidak lupa kami mengucapkan Selamat Hari Anti Narkoba ,semoga dengan Hari Anti Narkoba Dunia ini kita dapat tetap untuk mengampanyekan Kabupaten Rembang Anti Narkoba.

Hadirin Sidang Dewan yang kami Hormati

Dalam kesempatan ini izinkan kami FPKB DPRD Rembang mengucapkan terima kasih Kepada :

Pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Tahun Anggaran 2016.

Bupati Rembang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016 sebagai pengantar awal untuk dilakukanya pembahasan masing-masing komisi pada tanggal 10 Juli 2016. Sebagai Mitra Kerja yang baik ,dalam kesempatan ini FPKB tidak lupa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kerja keras saudara Bupati beserta seluruh jajaranya dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan Kabupaten Rembang sehingga berhasil meraih berbagai penghargaan ditingkat propinsi atau Nasional . meskipun masih terjadi kekurangan di sana sini termasuk penyerapan anggaran yg tidak maksimal khususnya di dinas ke PU an.ini di buktikan dengan masih terjadinya silpa yang cukup besar . Di sisi lain PAD 2016 naik kisaran 74.276.000.000. di luar perencanaan awal ini justru menunjukkan perencanaan awal yg tidak matang .Namun demikian dalam kesempatan yang sama kami juga ingin memberikan catatan berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016 seperti yang telah dibahas dalam berbagai kesempatan, maka FPKB ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

KELAYAKAN DOKUMEN , KULITAS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LKPJ BUPATI REMBANG TAHUN 2016

1.Penyajian LKPJ Tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rembang dalam bentuk narasi , dan hanya sebagian dari beberapa informasi yang sangat dibutuhkan dalam analisa dan penilaian kinerja Pemkab Rembang , sehingga pembaca laporan mengalami kesulitan dalam menelaah LKPJ tersebut.

Untuk itu kami meminta agar pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun berikutnya dalam menyampaikan LKPJ agar disajikan secara lengkap dan tidak hanya merupakan copy paste pada LKPJ pada tahun yang lalu. Agar juga menyajikan ringkasan capaian kinerja kebijakan melalui suatu matrik / táble yang sistematis.

Hadirin Sidan Dewan yang kami mulyakan

Dengan Mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima dan menyetujui **RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016** untuk ditetapkan menjadi Perda beserta rekomendasi-rekomendasi dari komisi-komisi.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang terhadap LKPJ Bupati Rembang Tahun 2016, LKPJ ini hanyalah Bagian kecil dari laporan keseluruhan hidup kita yang kelak laporannya akan kita pertanggungjawabkan pada ALLOH swt setelah di dunia ini.

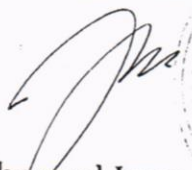
Kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Besar harapan kami agar menyampaikan Pendapat Akhir FPKB ini dapat dimaknai sebagai bentuk evaluasi dan kritik yang membangun, serta wujud kepedulian kami terhadap Pemkab Rembang dan Masyarakat yang Kita cintai.

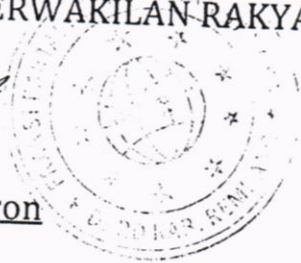
Wassalamu"alaikumWr.Wb.

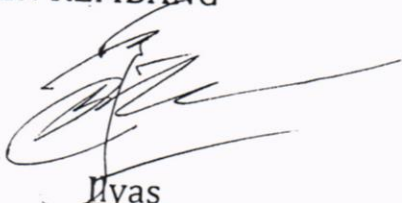
Rembang, 17 Juli 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Mohamad Imron
Ketua




Iyas
Sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP :

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Tanggal : 17 Juli 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati beserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan Wartawan, Ormas, Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat Paripurna dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD TA, 2016. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Setelah melalui proses pembahasan di tingkat komisi – komisi beserta OPD terkait, kami mengapresiasi proses pembahasan yang berjalan relative lancar Karena komunikasi antara OPD beserta komisi sebagai mitra kerja yang sangat baik ini mempermudah proses tersebut.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2016, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem “ Menyetujui Raperda Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD 2016 “ dengan catatan sebagai berikut :

1. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap kepala OPD bisa meningkatkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja para pegawai beserta jajaranya supaya bekerja lebih maksimal ,transparan dan professional, sehingga proses pembangunan di Kab. Rembang tidak tersendat dan bisa di rasakan oleh masyarakat semua.
2. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyoroti tentang LHP BPK kemarin bahwa masih terdapat banyaknya aset daerah yang belum tertata dengan baik dari tahun ke tahun. Dan ini menjadi perhatian khusus untuk Pemkab Rembang supaya kedepan dalam hal penataan aset ini jauh lebih baik dan Kab. Rembang bisa mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami sampaikan terhadap Raperda Pelaksanaan APBD 2016, semoga menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua.

M E R D E K A.!!!

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.


Salam sejahtera bagi kita semua.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. REMBANG

KETUA

JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016**



REMBANG, 17 Juli 2017



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Disampaikan oleh : Ayu Ardiyah Mayasari , S,pd.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 17 Juli 2017

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SALAM INDONESIA RAYA...

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten
Rembang
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan
Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggara 2016 yang telah didalami pada Rapat-rapat Komisi, Rapat

Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah memunculkan Rekomendasi yang disepakati bersama.

Selain Rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan kritis sebagai bahan evaluasi Pemkab Rembang kedepan.

1. Berdasarkan pencermatan Fraksi Gerindra bahwa kegagalan pembangunan sarana dan Prasarana di kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 adalah bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum. Diakui atau tidak diakui, fakta membuktikan bahwa capaian kinerja pada belanja langsung dari DPU masih kurang dari harapan, yaitu hanya sebesar beberapa persen saja. Ini merupakan prestasi yang sangat mengecewakan dan terendah sepanjang sejarah. Memang, kita tidak memungkiri bahwa ada faktor X yang membuat kinerja mereka melemah. Tetapi seharusnya para pegawainya tetap menjunjung tinggi sumpah dan janji PNS. Para pegawai seharusnya tetap bekerja secara Profesional dan bisa mengambil pengalaman dari pegawai yang terkena masalah yaitu dengan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melemah Kinerjanya atau malah mencari jalan lain yang tidak benar. Selain itu DPU juga menyebabkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di SKPD lain juga terhambat, bahkan serapan Anggaran kegiatan tersebut nol persen karena DPU tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut akibatnya pekerjaan gagal dilaksanakan. Kami menegaskan bahwa Bupati dan wakil Bupati perlu mengambil langkah-langkah strategis agar pembangunan bisa berjalan normal kembali.
2. Berkaitan dengan kinerja dari bagian Aset Pemkab Rembang yang menurut Fraksi Gerindra kinerjanya kurang maksimal dan kurang Profesional. Selain terkait proses penghapusan aset kantor lama Kecamatan Lasem yang tidak kunjung beres sejak tahun 2012, kami juga berpendapat bahwa terhambatnya perolehan opini dari BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan pemkab Rembang salah satunya disebabkan oleh Penataan aset yang masih bermasalah. Kami mendukung Pemberian Anggaran yang cukup agar masalah Aset bisa segera ditata dengan baik. Kabupaten tetangga yaitu Pati, dan Kudus saja sudah memperoleh WTP, masak kita belum. Selain masalah aset, juga perlu kesesuaian laporan

keuangan standar akuntansi pemerintah (SAP), efektifitas sistem pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan perlu adanya dukungan dari semua SKP selaku entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan program kegiatan sampai penatausahaan keuangan yang merupakan out put laporan keuangan SKPD.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian pendapat akhir kami, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim kami **dapat menerima dan menyetujui RAPERDA** Pertanggung jawaban ini ditetapkan menjadi **PERDA** Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2016. Atas segala kekurangan disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI PARTALGERINDRA DPRD REMBANG



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rembang
TA 2016

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD

Kabupaten Rembang
Hari Senin, 17 Juli 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten SEKDA dan Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Para Kepala Dinas, Badan, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Rembang
- Yang terhormat Sdr Camat dan para hadirin yang berbahagia.

Mengawali kesempatan ini, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rohmah dan berkahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam suasana yang bagus ini.

Para anggota Dewan dan hadirin sekalian.

Setelah melakukan pembahasan yang cukup hangat dalam rapat-rapat antara komisi-komisi DPRD dengan OPD maupun Badan Anggaran dengan TAPD, tibalah saatnya Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan Pendapat Akhir atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sbb,

- Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar pelaksanaan APBD 2016 memang sudah berjalan walaupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang memprihatinkan terutama di sektor pembangunan infrastruktur. Maka Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang berharap dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan ini semua OPD “cancut tali wanda” bekerja keras sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi.
- Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Kabupaten Rembang didepan, agar betul-betul diindahkan.
- Saat ini kita masuk dalam era “media sosial” seperti face book, massenger, whatsapp (WA), tweeter dsb. Masyarakat memanfaatkan media sosial ini sebagai saluran untuk mengungkapkan gagasannya; berupa gagasan memajukan daerahnya, memberi masukan kepada pemerintah, mengkritik kebijaksanaan pemerintah dsb. Pemerintah diharapkan tidak alergi atau menutup mata/telinga terhadap masukan/kritik tersebut, pemerintah sekarang bukan lagi “menara gading” yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Maka dari itu Fraksi Karya Sejahtera mengajak kita semua untuk peduli terhadap “detak jantung” masyarakat tsb.

Demikianlah, disertai catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya Sejahtera dengan ini menyetujui

ditetapkannya RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 Kabupaten Rembang menjadi PERDA APBD TA 2016 Kabupaten Rembang.

Terima kasih - Wassalamu'alaikum wr. wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,


H. ISMARI, SH



H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

Dibacakan Oleh : Paramita Prapanca A.N.R, S.Pd

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD T.A 2016 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Dinamika dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T.A 2016, seyogyanya menjadi "guru" dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017. Kelebihan dan kekurangannya menjadi cerminan, bagaimana melaksanakan program dan kegiatan untuk lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Mengamati pelaksanaan APBD Tahun 2017, terdapat keterlambatan penyerapan anggaran, dan hal serupa juga terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun 2016. Kami mengharapkan pemerintah kabupaten Rembang, mencermati keterlambatan ini dan menjadikan hal tersebut sebagai skala prioritas penting, mengapa dalam 2 (dua) tahun berturut-turut kita mengalami persoalan yang sama.

Kami mendorong upaya pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai tulang punggung Pemerintah Kabupaten Rembang. Mengulang apa yang telah kami sampaikan pada pandangan umum bahwa Laporan Pertanggungjawaban adalah gambaran kinerja masing-masing OPD sebagai sebuah *teamwork*. Tingkat capaian, penyerapan anggaran, kondusifitas kerja adalah sebuah gambaran sejauh mana Aparatur Sipil Negara memahami tupoksi, visi misi Bupati dan Wakil Bupati, komitmen untuk menjaga rencana-rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan etos kerja untuk mencapai hal tersebut.

Kami mengharapkan laporan pertanggungjawaban ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam melakukan penilaian dan penempatan personil pada masing-masing OPD.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016 dapat ditetapkan menjadi
peraturan daerah.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua



SUKARMA

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Tanggal, 17 Juli 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Terakhir DPRD, dalam rangka **“Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai dengan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun Anggaran 2016, kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti

yang telah kami sampaikan pada sidang pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, bahwa dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.490.592.742.455,00 (**Satu trilyun empat ratus sembilan puluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.564.868.839.955,55 (**Satu trilyun lima ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam**

puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh lima rupiah) atau 104,98%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp. Rp.1.874.875.616.260,00 (**Satu trilyun delapan ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah**) direalisasikan sebesar Rp. 1.734.304.081.928,58 (**Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah**) atau 92,50%, meliputi atas belanja dan transfer dengan rincian untuk belanja dari yang direncanakan sebesar Rp. 1.577.568.770.260,00 (**Satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah**) realisasinya adalah sebesar Rp. 1.438.006.027.928,58 (**Satu triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar enam juta duapuluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan**

koma lima puluh delapan rupiah) dan transfer dari yang direncanakan sebesar Rp. 297.306.846.000,00 (**Dua ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah**) realisasinya adalah sebesar Rp. 296.298.054.000,00 (**Dua ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah**).

Sedangkan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 396.607.873.805,00 (**Tiga ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah**) realisasinya sebesar Rp. 396.607.873.805,61 (**Tiga ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima koma enam puluh satu rupiah**) atau 100,00%. Dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 12.325.000.000,00 (**Dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah**) realisasinya sebesar Rp. 12.296.725.422,00 (**Dua belas**

milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau 99,77%.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban yang saya sampaikan ini merupakan gambaran umum pelaksanaan program prioritas dan strategis selama tahun anggaran 2016 dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita bersama.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir
Rapat Peraturan Daerah tentang

7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik. Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15. TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli 2017.
 2. Pendapat Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli 2017.
 3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

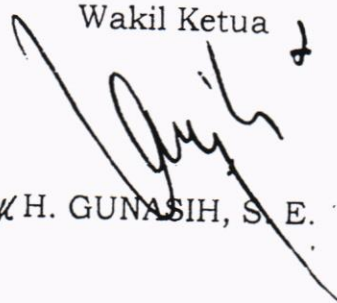
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua


H. GUNASIH, S. E.

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli 2017.
2. Pendapat Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli 2017.
3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

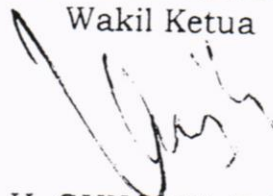
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua



H. GUNASIH, S. E.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1 / 2017

NOMOR : 900 / / 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016
MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada Hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** **Dua Ribu Tujuh Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I. : Bupati Rembang , dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. H. GUNASIH, S. E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. M. BISRI CHOLIL.L : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah .

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

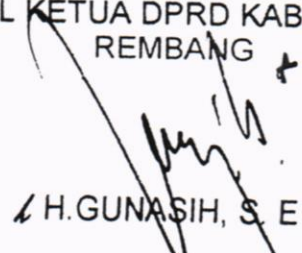
Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

BUPATI REMBANG



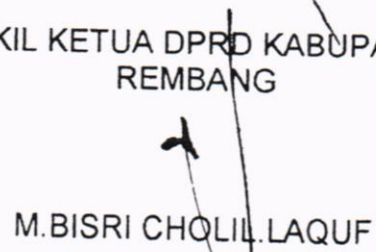
H. ABDUL HAFIDZ, S. P.dl.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG



H. GUNASIH, S. E

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG



M. BISRI CHOLIL LAQUF

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG



SUMARSIH

